

Perpustakaan
Sejarah dan

O
E

Perc. Dominan bna.

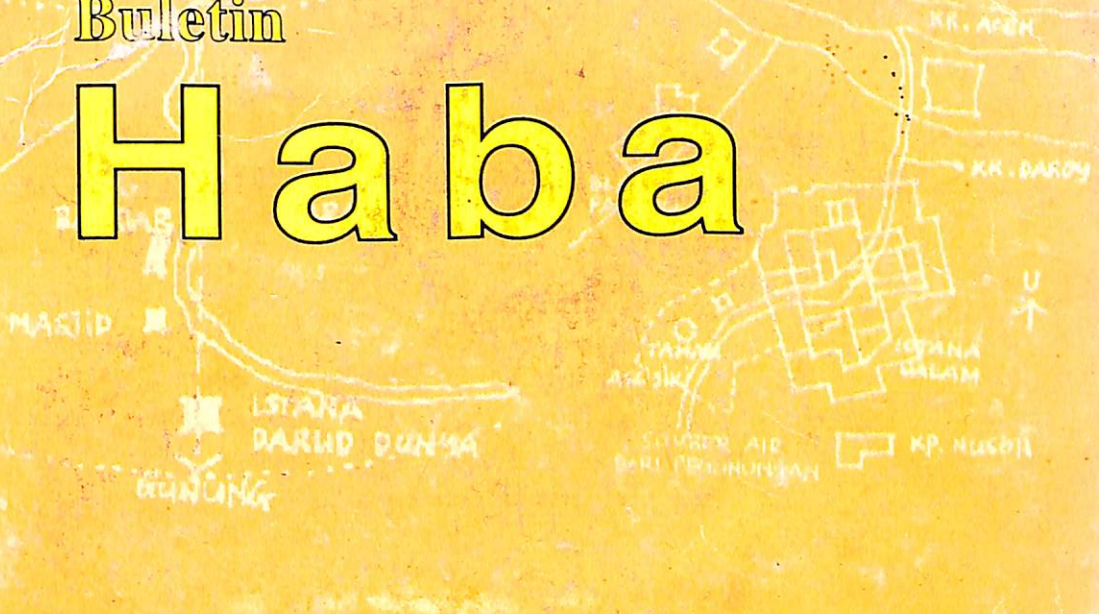
I. MASA HINDU LAUT

II. MASA ISLAM (ROMAWI)

ISSN : 1410 - 3877

Buletin

H a b a



III. MASA KOLONIAL (EROPA) RAKYAT

CINA (ASIA TIMUR)



Kapita Selekta Sejarah

Balai Pelestarian
Nilai Tradisional

705
UL

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh

2002 **25**

H a b a

**Informasi Kesejarahan
dan Nilai Tradisional**

**No. 25 Th. IV
Edisi Oktober – Desember 2002**

PELINDUNG

Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan
Budaya BP Budpar
Direktur Sejarah, Direktur Tradisi dan Kepercayaan
Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi NAD

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh

DEWAN REDAKSI

M. Hakim Nyak Pha
Rusdi Sufi
Aslam Nur

REDAKTUR PELAKSANA

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional
Agus Budi Wibowo
Elita Batara Munti
Sudirman

SEKRETARIAT

Kasubbag TU
Bendaharawan Rutin
Makmun Abdullah
Yulhanis
M. Saleh
Azizah
Netti Dami
M. Jamil

ALAMAT REDAKSI

Jln. Tuanku. Hasyim Banta Muda 17 Banda Aceh
Telp. (0651) 23226, 24216
Faks. (0651) 24216

Diterbitkan oleh :

**Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh**

Redaksi menerima tulisan yang relevan dengan misi Balai Kajian Jarahnitra Banda Aceh dari pembaca 4-8 halaman diketik 2 spasi, roman 12, ukuran kwarto. Redaksi dapat juga menyingkat dan memeriksa tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah maksud dan isinya

ISSN : 1410 - 3877

STT : 2568/SK/DITJEN PPG/STT/1999

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

Info

Kegiatan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh di Penghujung Tahun

Wacana

- Elysa Wulandari dan Hilda Mufiaty Studi Sejarah dan Perencanaan Tata Ruang Kota Banda Aceh Periode Kolonial Belanda
- Teuku Abdullah dan Sardani *Sayid* (Keturunan Arab) di Aceh Dalam Lintasan Sejarah (Sebuah Telaah pada Aspek Posisi dan Peranan)
- Zulfan Aceh Timur dalam Perang Kemerdekaan 1945-1949 (Suatu Tinjauan Tentang Basis Ekonomi dan Penampungan Pengungsi)
- Sudirman Perkebunan dan Perdagangan: Proses Integrasi Masyarakat di Sumatera Timur Abad ke-19 hingga Awal Abad ke-20
- Seno Peranan Barus Sebagai Pusat Perdagangan di Wilayah Pantai Barat Sumatera Utara pada Abad XVII-XIX
- Titit Lestari Keberadaan Bahasa *Jawi* di Aceh (Tinjauan Historis)
-
- Cerita Rakyat**
Sukuten Nangke Beobak
-
- Pustaka**
Jurnal SUWA 4/2002
-
- Cover**
Ilustrasi (T. Lestari)
-

PENGANTAR

Redaksi

Keterbelengguan sering kali membuat kita tidak dapat berkreatifitas secara maksimal, termasuk di dalamnya dalam hal kegiatan tulis-menulis. Walaupun di dalam setiap penerbitan haba, tidak ada niatan redaksi menjadi terbelenggu dengan adanya penetapan tema tertentu di dalam setiap edisi, namun terkadang tema tersebut dapat juga membatasi kreatifitas kita.

Oleh karena itu, redaksi memandang perlu membuat "tema" yang tidak terfokus, yaitu Kapita Selekta Sejarah. Tema ini merangkum berbagai tulisan terpilih yang menggambarkan berbagai bahasan tentang aspek-aspek kesejarahan di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara, sesuai dengan wilayah kerja dari Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.

Kami berharap tulisan-tulisan yang redaksi suguhkan kepada pembaca akan menambah wawasan dan cakrawala pandangan dan berpikir. Dengan demikian, akan mempersempit paham etnosentrisme atau kedaerahan. (Abw)

Redaksi

Kegiatan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh di Penghujung Tahun

Koordinasi Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (Spiritual) Nanggroe Aceh Darussalam

Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa Aceh merupakan salah satu daerah yang berlatar belakang budaya Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan syariat Islam yang telah dicanangkan di Aceh merupakan wujud nyata bahwa segala sendi-sendi kehidupan masyarakat harus sesuai dengan syariat Islam.

Supaya pelaksanaan syariat Islam itu dapat bermanfaat dan menjadi rahmat bagi umat manusia, diperlukan pemahaman yang kaffah terhadap ajaran Islam. Dengan demikian, salah satunya muncul sikap toleransi antarumat beragama.

Salah satu upaya untuk itu adalah telah dilaksanakan kegiatan koordinasi pembinaan nilai-nilai budaya (spiritual) oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh. Acara tersebut berlangsung pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2002, di Aula Jeumpa Hotel, kompleks SMKN 3, Banda Aceh.

Pada acara itu, tampil enam orang pembicara yang dibagi dalam dua seasen. Pada seasen pertama sebagai pembicara, Prof. Dr. M. Hakim Nyak Pha, S.H., DEA., dengan makalah *Nilai-Nilai Islam dalam Kontruksi Adat Aceh*. Pembicara kedua Dr. T. Safir Iskandar Wijaya, M.A., dengan makalah *Kehidupan Antarumat Beragama di Aceh*; dan pembicara ketiga Drs. Aslam Nur, M.A., dengan makalah *Islam dan Pluralisme Agama: Rekonstruksi Sejarah Periode Rasulullah dalam Kehidupan Masyarakat Aceh Masa Kini*. Pada seasen kedua sebagai pembicara adalah dari Kanwil Depag. Nanggroe Aceh Darussalam, yang diwakili oleh Drs. Rahman TB., dengan makalah *Peran Pemerintah dalam Pembentukan Masyarakat Aceh yang Islami, Bermartabat, dan Toleransi*. Pembicara kedua dari Majelis Permusyawaratan Ulama, yang diwakili oleh H. Badruzzaman, S.H., M. Hum., dengan makalah *Peran Pemuka Agama dalam Pembentukan Masyarakat Aceh yang Islami,*

Bermartabat, dan Toleran; dan yang ketiga adalah Kebijakan Teknis Operasional Direktorat Tradisi dan Kepercayaan BP. Budpar, yang diwakili oleh Drs. Shabri A., Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.

Penulisan Booklet dan Leaflet

Berbagai cara telah dilakukan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh untuk menyebarkan informasi kesejarahan dan kenilaitradisional, di antaranya melalui penulisan booklet dan leaflet. Hal itu dilakukan, mengingat tidak semua orang sempat dan mampu membaca hasil penelitian yang dikemas dalam bentuk buku atau jurnal dengan jumlah halaman yang banyak. Oleh karena itu, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh berusaha membuat semacam bacaan ringan dan ringkas untuk semua kalangan.

Kali ini, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, membuat booklet dengan judul *Wisata Ziarah ke Makam Hamzah Fansuri*, dan leaflet dengan topik *Sejarah Perjuangan Tuanku Hasyim Bangta Muda dan Teuku Panglima Polem Muhammad Daud*.

Penulisan Biografi Ulama Aceh

Dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh, ulama memiliki peran yang sangat besar dalam penyebaran agama, membimbing dan pejuang aspirasi umat. Hal itu seperti tertuang dalam pepatah Aceh *adat bak po teu meureuhom, hukom bak syiah kuala*. Peran ulama tersebut diperkuat lagi dengan undang-undang keistimewaan Aceh, tentang kedudukan dan peran serta ulama dalam pemerintahan.

Demikian besarnya peran ulama dalam masyarakat Aceh. Untuk itu, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Nanggroe Aceh Darussalam melakukan penulisan biografi ulama Aceh, khususnya ulama Aceh abad XX. (Dir)

Studi Sejarah dan Perencanaan Tata Ruang Kota Banda Aceh Periode Kolonial Belanda

Oleh Elysa Wulandari dan Hilda Mufiaty

Pendahuluan

Kota Banda Aceh secara garis besar telah mengalami 4 periode perkembangan kota yang terkait dengan perkembangan sosial politik masyarakatnya¹ yaitu: 1. periode Kesultanan Aceh, 2. Periode Penjajahan Belanda (masa kolonial), 3. Periode awal kemerdekaan dan 4. periode orde baru. Setiap periode memiliki ciri, karakter dan kecenderungan tertentu yang berbeda karena aspek waktu perkembangan yang cukup panjang dan perbedaan tersebut sangat mudah dikenali, khususnya yang terkait dengan perkembangan politik daerah Banda Aceh (perubahan sistem kekuasaan dan penguasa di dalam kota). Perbedaan tersebut mudah diidentifikasi, karena adanya peninggalan berupa pembangunan fisik di dalam kota yang dibangun untuk kepentingan penguasa dari setiap periode dan saat ini berperan sebagai artifak yang membantu kita memahami apa yang terjadi pada suatu kota dari masa ke masa. Peninggalan tersebut baik berupa ruang aktivitas berkehidupan maupun objek bangunan.

Periode penjajahan Belanda (kolonial Belanda) merupakan periode yang sangat berarti bagi perkembangan kota-kota di Indonesia termasuk kota Banda Aceh. Di masa kolonial tersebut, pembangunan kota modern mulai dilakukan. Kota modern ditandai oleh penyediaan sarana prasarana kota yang relatif

lengkap sebagai suatu pusat kegiatan kota, seperti sarana jalan, fasilitas umum/sosial.

Banda Aceh dalam perkembangannya pernah menjadi pusat kegiatan pemerintah kolonial Belanda bagi kawasan Banda Aceh dan sekitarnya (Aceh Besar), yang tingkat pelayanannya setara dengan kota kecamatan dengan pemerintah sipilnya Asisten Residen. Masa kolonial di Banda Aceh relatif pendek jika dibandingkan dengan kota-kota di Indonesia, namun pembangunan yang ada telah memberikan cikal bakal yang berarti bagi perkembangan kota Banda Aceh modern hingga saat ini. •

Aspek Fisik Dasar Kota Banda Aceh

Secara fisik dasar, lokasi kota Banda Aceh masa kolonial Belanda berkembang pada lokasi kota lama, di sekitar kanan kiri sungai Kr. Aceh dan Kr. Daroy. Dilihat dari kondisi daerah (*terrain*), merupakan daerah pesisir berupa dataran rendah, rawa-rawa pasang surut air laut dan sering terjadi banjir. Ketinggian dari muka laut rata-rata kurang dari 1 m. Banyak terdapat alur dengan arah aliran ke sungai Kr. Aceh dan ke Utara (daerah pesisir). Pemukiman (perkampungan) tumbuh secara berkelompok dan organis pada bagian daerah yang sedikit relatif lebih tinggi.

Aspek Sejarah Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh secara historis, sudah berkembang sejak masa kerajaan Aceh, khususnya masa kejayaan Sultan Iskandar Muda. Kota Banda Aceh yang terletak di sekitar sungai Kr. Aceh, berdasarkan hasil penelitian mulanya dikembangkan dengan konsep yang diadaptasi dari kebudayaan

¹ Elysa Wulandari, *Studi Sejarah dan Perencanaan Tata Ruang Kota Banda Aceh Periode Kesultanan Aceh*. (Banda Aceh: Penelitian DIKS Unsyiah, 1998).

Hindu dan kemudian dari bangsa Turki dengan pola kota Romawi kuno². Elemen-elemen pembentuk kota dibangun dari bahan-bahan yang tidak permanen, sehingga hampir sebagian besar objek bangunan hancur akibat perang, namun secara *spasial* karakter ruang yang terbentuk masih dapat dikenali, seperti: jalan setapak yang menghubungkan tempat-tempat di dalam kota yang sekarang sudah berkembang menjadi jalan kendaraan roda 4; ruang terbuka dan pusat aktivitas seperti kawasan *Gunongan, Pinto Khop*; batas-batas kawasan atau lingkungan seperti bekas benteng *Dalam raja* dan benteng lokasi Masjid Jami' kota, kuburan yang penandanya dari batu nisan.

Aspek Sosial Budaya Masyarakat Kota Banda Aceh

Setelah perang kolonial Belanda yang kemenangan ada di pihak Belanda, masyarakat kota Banda Aceh dapat dikatakan sangat marginal secara fisik. Namun demikian secara spiritual masyarakat Banda Aceh masih memegang teguh agama Islam dan berusaha mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Sehingga salah satu cara pemerintah kolonial mengambil hati masyarakat Banda Aceh agar mau menerima kehadiran bangsa Belanda - yang dianggap oleh orang Aceh sebagai bangsa kafir- adalah dengan membangun kembali Masjid Raya yang sudah terbakar dengan bangunan yang lebih megah, permanen dari sebelumnya³.

Secara ekonomi, masyarakat Aceh khususnya masyarakat kota Banda Aceh mengalami kemunduran dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera. Perdagangan antar negara untuk Sumatera mulai dikuasai oleh Sumatera Utara yang mana pemerintah kolonial Belanda telah membangun kota Medan sebagai kota Bandar dengan

hinterlandnya perkebunan di daerah sekitar kawasan Deli hingga Aceh Timur sekarang. Sedang secara regional wilayah selat Malaka, daerah yang berkembang sebagai kota Bandar adalah Kota Penang. Selama perang kolonial Belanda, Banda Aceh sebagai kota Bandar tidak berkembang. Setelah Belanda menguasai Aceh, maka mereka ingin menghidupkan kembali perekonomian daerah dengan langkah awal memberlakukan Sabang sebagai pelabuhan bebas disamping mulai membangun pelabuhan Ulelheue⁴ dan sarana pendukung kegiatan perekonomian lainnya.

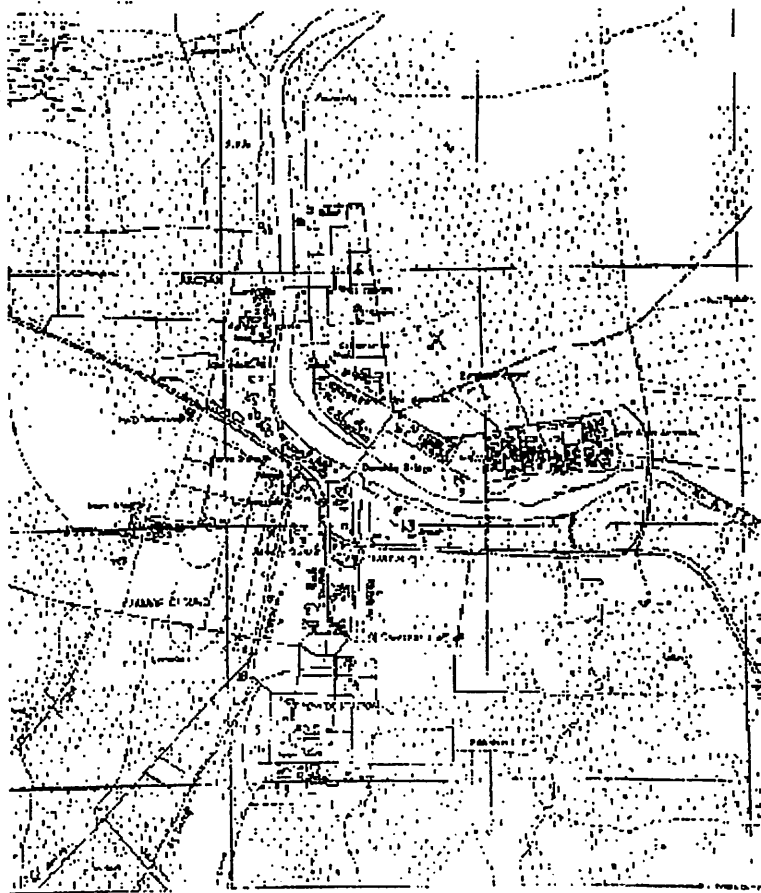
Struktur Tata Ruang Kota Banda Aceh Periode Kolonial Belanda

Proses pembangunan kota Banda Aceh pada periode kolonial Belanda dimulai setelah perang berakhir (1874) yang menghancurkan secara total fisik kota. Penguasaan wilayah kota ada di tangan pemerintah Belanda. Lihat peta Kota Banda Aceh periode Kolonial Belanda berikut ini:

²Ibid.

³M. Isa Sulaiman "Banda Aceh Dalam Siklus Perdagangan Internasional Suatu Tinjauan Historis", dalam kumpulan *makalah* Kota Banda Aceh Hampir 1000 Tahun (Banda Aceh: Pemda Kodya TK II, Banda Aceh, 1998)

⁴Ibid



Gambar No.1 : Peta Kota Banda Aceh masa Kolonial Belanda

Pemerintah Belanda membangun kota Banda Aceh dengan pemberian nama kota yaitu Kuta Radja, sebagai kota administrasi yang setingkat dengan kota kecamatan saat ini. Pembangunan kota hanya berlangsung hingga tahun 1942, sebelum masuknya Jepang. Pemerintah kolonial Belanda membangun kota di atas reruntuhan kota Banda Aceh masa Kerajaan Aceh, sehingga peninggalan masa kerajaan Aceh relatif kehilangan jejak. Namun demikian terdapat beberapa karakter tempat yang sudah terbentuk sejak periode sebelumnya masih dipertahankan.

Struktur kota Banda Aceh periode kolonial Belanda secara fisik dipengaruhi oleh adanya sungai Kr. Aceh. Dalam perkembangan kota kemudian, sungai tersebut

akan membagi kota Banda Aceh dalam 2 bagian, yaitu bagian Timur dan bagian Barat. Di bagian Barat sungai, merupakan lokasi fungsi-fungsi utama (umum) kota dengan memanfaatkan tempat yang lama, hanya saja bangunan fisiknya dibangun dengan bangunan baru yang permanen. Umumnya di bagian Barat sungai, fungsi yang dikembangkan adalah fungsi pemerintahan sipil Belanda, perumahan sipil dan petinggi militer serta fasilitas kota (pasar/perdagangan, sosial, hiburan, perkantoran, dll). Di bagian Timur sungai, sebagian besar merupakan lahan kosong kecuali kawasan Peunayong sebagai kawasan pemukiman pendatang. Di daerah ini dibangun fasilitas militer: barak, kantor, rumah sakit dan perumahan sipil orang Eropa.

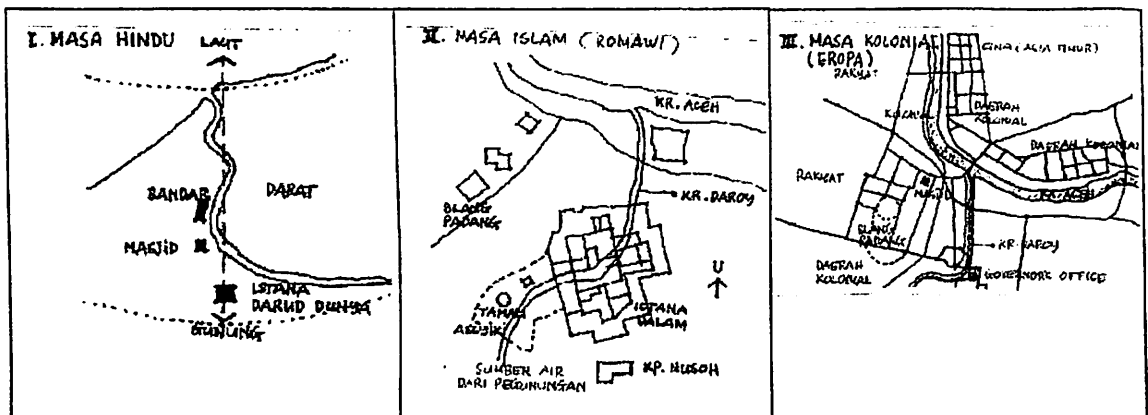
Wacana

pemerintah Belanda ditujukan untuk kepentingan militer (keamanan) bangsa Belanda dalam menguasai daerah sekitar Banda Aceh dan pengangkutan logistik mereka. Setelah wilayah sekitar Banda Aceh relatif aman, fungsi kereta api secara perlahan berubah menjadi fungsi ekonomi dan sekaligus memanfaatkan pelabuhan Ulelheu sebagai pintu gerbang Aceh ke dunia luar, yaitu untuk mengangkut hasil bumi ke luar daerah Banda Aceh. Dampak bagi perkembangan kota, maka sekitar jalur rel kereta api berkembang pemukiman penduduk pribumi dan pendatang dari India, Arab, dll yang tumbuh secara sporadis dan sarana jalan kendaraan bermotor yang sejajar dengan rel. Daerah permukiman baru ini (kawasan Merduati sekarang) sebenarnya secara fisik dasar ruang merupakan daerah rendah yang sering dilanda banjir, tapi berdasarkan sejarah keberadaan masyarakat Banda Aceh terlihat daerah ini memang bukan daerah permukiman. Sehingga mudah bagi pendatang yang tidak memiliki tanah untuk menempati daerah kosong ini.

Dilihat dari arsitektur kota kolonial Belanda di Banda Aceh adalah suatu fenomena budaya yang unik sama halnya dengan daerah-daerah di Indonesia. Hal ini

karena telah terjadi percampuran budaya antara penjajah yang berakar dari Eropa dan budaya Masyarakat Aceh yang berakar dari tradisi Hindu kemudian Islam. Percampuran budaya tersebut ditemukan dalam perencanaan struktur ruang kota yang mana terkait dengan pola-pola aktivitas masyarakat di dalam kota, bahkan terkait dengan pola kota yang sudah ada sebelumnya, seperti pola tata ruang kota untuk peletakan *Dalam raja*, mesjid dan pasar, yang dimulai dengan kosmologi Hindu, kemudian Islam dan kemudian dikembangkan pada periode kolonial Belanda.

Konsep Kosmologi Hindu hanya berbicara konsep tata ruang yang terkait dengan keberadaan Raja di dunia, khususnya berbicara dari segi zonase. Sedang konsep Islam (Romawi) sudah berpikir tentang struktur suatu kota yang didukung oleh kehidupan masyarakat umum. Sehingga kota mengalami perluasan tanpa merusak konsep yang lama. Pada periode Kolonial Belanda, kota yang hancur kemudian dibangun di tapak kota lama untuk kepentingan Belanda seperti peletakan bangunan sipil belanda di sekitar alun-alun (dekat dengan kawasan mesjid) dan bangunan militer di sekitar pusat pemerintah (daerah *Dalam Raja*). Lihat perkembangan tipologi pola kota Banda Aceh.



Gambar No. 2 : Perkembangan Tipologi Pola Kota Banda Aceh dari Periode Kesultanan Aceh hingga periode Kolonial Belanda

2. Penzonan kawasan kota

Di dalam perencanaan tata ruang kota kolonial terlihat struktur kotanya terdiri dari zona-zona yang membedakan tempat untuk fungsi-fungsi kegiatan kota seperti lingkungan pemerintahan, kawasan militer, rumah tinggal, komersial dll. Selain itu lingkungan pemukiman juga dibedakan berdasarkan asal penduduk seperti: pribumi, pendatang India dan Arab, Cina, Eropa. Pemerintah kolonial menempatkan orang Eropa lebih tinggi dari pribumi, sedang etnis Cina termasuk kelas dua setelah bangsa Eropa yang tempat tinggalnya terkenal dengan sebutan Pecinan (kawasan Peunayong sekarang). Zona pemerintahan dan militer ditempatkan sekitar kawasan *Dalam* (pendopo sekarang), perumahan petinggi militer Eropa di Neusu, perumahan Sipil Belanda disekitar *Parade Ground* (lapangan Blang Padang), militer pribumi di Blower, fasilitas militer Belanda di daerah Kuta Alam, pendatang Eropa di sekitar jalan Daud Bereueh sekarang dan pendatang India Arab di kawasan Keudah. Sedangkan penduduk asli/pribumi menempati daerah pinggiran dengan kualitas lingkungan buruk.

3. Ruang Terbuka Kota

Keberadaan ruang terbuka kota hampir menjadi bagian penting dari perencanaan kota kolonial Belanda di Indonesia. Umumnya untuk kawasan penting hampir selalu memiliki ruang terbuka berbentuk *square* yang sering berfungsi juga secara sosial. *Square* di kitari oleh jalan dan dikelilingi oleh bangunan baik bangunan pemerintah maupun pada daerah perumahan. Perencanaan ruang terbuka utama kota untuk kota kolonial di Jawa sering dikaitkan dengan fungsi alun-alun yang terletak di depan-belakang kawasan keraton raja. Alun-alun dalam budaya Jawa bagian terpenting dari proses kehidupan sosial raja⁷.

Berbeda dengan kota kolonial Belanda di Banda Aceh, penciptaan *Parade Ground* (lapangan Blang Padang) antara kawasan Mesjid Raya dan poros jalan kota-

Ulelheu (daerah Meuraxa) berkesan sebagai kawasan pengontrol mobilitas masyarakat dari luar kota ke pusat kota. Sedangkan 'alun-alun' di Kota Banda Aceh, bukan sebagai pusat berkumpul masyarakat dalam kaitan dengan kedaulatan Raja, tapi lebih terkait dengan aktivitas religius di mesjid Raya. Oleh karena itu, 'alun-alun' (ruang terbuka utama kota) sebagai tempat berkumpul masyarakat, berada di depan mesjid raya.

B. Elemen Bangunan

Bangunan di dalam kota Banda Aceh pada masa kolonial dapat dilihat tipenya berdasarkan fungsi bangunan, yaitu: bangunan rumah tinggal, bangunan pemerintah/perkantoran. Bangunan rumah tinggal dibedakan antara bangunan *kopel* dan bangunan *tunggal*. Umumnya bangunan rumah berkopel untuk rumah militer yang dibangun lebih awal dibandingkan rumah lainnya. Untuk masyarakat sipil Eropa dibangun rumah tunggal dan ada yang sudah bangunan permanen. Kawasan rumah tinggal umumnya memiliki tata lingkungan yang *building coveragenya* berkisar 60 %, sehingga banyak ruang terbuka yang memberi kesan asri pada rumah tinggal tersebut. Pola lingkungan rumah tinggal terdiri dari 2 tipe, tipe *grid*, untuk kepadatan yang relatif tinggi dan dihuni oleh masyarakat menengah Eropa. sedangkan tipe mengelilingi *square* untuk kepadatan rendah bagi pejabat pemerintah kolonial Belanda.

Keunikan bangunan rumah tinggal pada periode kolonial Belanda adalah adanya penyesuaian bentuk bangunan dengan kondisi alam yang berdaerah rawa dan rawan banjir, beriklim tropis basah, banyak angin, hujan serta panas. Penyelesaian bangunan untuk menanggapi kondisi banjir adalah bangunan berbentuk panggung yang tingginya berkisar 1 meter. Sistem panggung juga sebenarnya baik untuk mengeringkan muka lantai yang sering lembab. Penyelesaian bangunan terhadap iklim tropis basah terlihat dari: ketinggian ruang lebih dari 3 meter, atap bangunan relatif runcing, bangunan memiliki beranda/teras, bukaan yang lebar dan tinggi, ventilasi yang banyak dan bersilang.

⁷Ibid.

Wacana

Arsitektur bangunan perkantoran, dibedakan 2 periode. Periode sebelum 1900-an, umumnya semi permanen dan bentuk panggung. Menyerupai rumah besar bergaya *Indisch*. Saat ini tipe bangunan ini sudah banyak dihancurkan. Sedang periode setelah 1900-an, umumnya bangunan perkantoran sudah memiliki gaya tertentu sebagaimana bangunan kantor yang ada di Eropa seperti bergaya *Neoklasik*, *Art deco* dll, contoh bangunan Bank Indonesia dan SMUN 1.

Penutup

Perkembangan arsitektur kota maupun bangunannya pada periode kolonial Belanda di Banda Aceh dapat dikategorikan sebagai arsitektur modern, karena perencanaannya mengikuti konsep-konsep dari arsitektur modern yang sudah lebih dulu berkembang di Eropa, tempat asal bangsa Belanda. Hal ini dimungkinkan karena Belanda sebagai penguasa tunggal di kota Banda Aceh. Dalam perkembangan perencanaan tata ruang kota Banda Aceh selanjutnya, terlihat percampuran dan tumpang tindih antara

konsep dari budaya Eropa, Hindu, dan Islam. Namun demikian setiap periode perkembangan masih dapat ditelusuri keberadaannya

Perkembangan arsitektur kolonial di Banda Aceh, yang meliputi tata ruang kota dan bangunannya, terpusat pada kota lama yang sudah ada sejak zaman kesultanan Aceh. Elemen-elemen fisik kota lama yang permanen berbaur dengan arsitektur kolonial yang dibangun kemudian. Perencanaan tata ruang kota periode kolonial Belanda sudah memberikan dasar-dasar perkembangan kota Banda Aceh hingga saat ini, khususnya berkenaan dengan prinsip transportasi di dalam kota yang menentukan pola kota. Dasar perencanaan lainnya yaitu konsep zonase yang memisahkan penggunaan tanah di dalam kota. Dasar perencanaan lainnya adalah prinsip ruang terbuka kota yang menjadi paru-paru kota dan ruang aktivitas bagi masyarakat kota..

Penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan untuk periode selanjutnya, sehingga kita dapat melihat bagaimana proses kesinambungan perencanaan kota dan diharapkan dapat diketahui aspek positif dan negatif yang dapat dimanfaatkan untuk perencanaan kota masa akan datang.

Ir. Elysa Wulandari, M.T dan Hilda Mufiaty, ST adalah Dosen Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Sayid (Keturunan Arab) di Aceh dalam Lintasan Sejarah (Sebuah Telaah pada Aspek Posisi dan Peranan)

Oleh Teuku Abdullah dan Sardani

Pendahuluan

Sayid adalah keturunan Arab dari Haderamaut. Mereka mengklaim diri keturunan Nabi Muhammad SAW, melalui putrinya Fathimah istri Ali bin Abi Thalib. Jika benar dari Haderamaut (Yaman bagian selatan), negeri di Arabia selatan ini merupakan tempat hijrah Imam Ahmad al-Muhajir, yang hijrah dari Irak sekitar seribu tahun lalu. Keturunan Ali bin Abi Thalib ini adalah imam besar syiah asal Irak,¹ membawa 70 orang keluarga dan pengikutnya. Sejak itu berkembanglah keturunannya hingga menjadi kabilah terbesar di Hadramaut. Banyak di antara mereka menjadi tokoh ulama dan da'i kondang. Berdasarkan taksiran tahun 1366 H., jumlah mereka tidak kurang dari 70.000 jiwa dengan 200 marga.

Keturunan inilah yang mengembara dan melakukan perdagangan sambil menyebarkan misi Islam, ke segala penjuru dunia,² termasuk Indonesia (Aceh). Hampir dapat dipastikan mereka adalah pengikut syiah, elit keturunan Arab ini disebut Hamka sebagai keturunan Saiyidina Hassan dan Saiyidina Husain, atau *sibthi* (cucu) Rasulullah.³ Melalui merekalah munculnya silsilah keturunan dari Rasul Muhammad

SAW. Kelompok ini dikenal di Aceh dengan sebutan *sayid* untuk laki-laki, dan *syarifah* untuk perempuan.

Sebagaimana halnya keturunan Arab di daerah lain di Indonesia, di Aceh, pada masa lalu *sayid* dan *syarifah* (*sibthi*) Rasulullah cukup beruntung. Mereka mendapat posisi sebagai orang yang terhormat, mulia dan berkharisma di mata masyarakat. Golongan ini sering terposisi sebagai pemimpin non-formal atau kelompok penengah antara dua pimpinan formal (elit *teuku* dan *teungku* atau *uleebalang* dan *uluma*), kehadiran *teuku* dan *teungku* dalam masyarakat, dianggap penting dan mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial, adat, agama yang sering muncul di kalangan masyarakat.

Pandangan mayoritas orang Aceh terhadap *ahlul bait* Rasulullah ini, dianggap mengerti banyak tentang agama, istiqamah dalam pendirian dan penegak *amar ma'ruf nahi mungkar*, kerana mereka keturunan Nabi Muhammad saw. Di samping itu dalam wawancara tim penulis dengan salah seorang tokoh masyarakat di Bluek, Kecamatan Indra Jaya, Kabupaten Pidie, bahwa kharisma *sayed* juga terpelihara, sebab golongan ini mapan dalam bidang religius, sopan, mapan ekonomi, bukan golongan bawah. Lebih lagi muncul persepsi dalam masyarakat Bambi, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, bahwa siapa pun yang mencintai, menghormati memberikan keutamaan bagi keturunan Nabi maka akan mendapat pahala besar bahkan masuk syurga.

¹ Republika, 10 Nopember 2002.

² Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Bandung : Mizan, 1992), hlm. 28.

³ Hamka, 1987. "Kata Sambutan Prof. Dr. Hamka : Ketua MUI" dalam *Al Hamid al-Husaini, al-Husain bin Ali r.a. Pahlawan Besar dan Kehidupan Islam pada Zamannya*, (Jakarta: Yayasan Waqfiyyah Al Hamid al-Husaini, 1978), hlm. V.

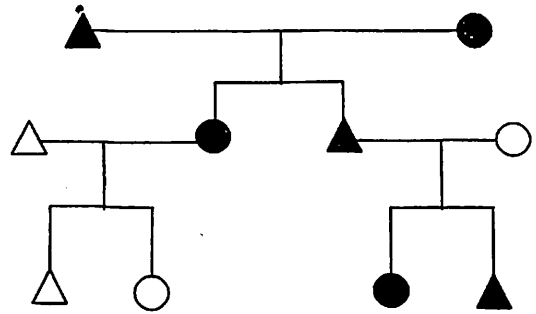
Pembauran dengan Masyarakat Biasa

Tali perkawinan golongan *sayid* pada masa lampau cenderung tertutup. Mereka mengutamakan keturunan kerabat dekat dalam konsep pertalian darah. Golongan ini tidak akan pernah memberi izin bila putra-putrinya melakukan perkawinan dengan orang yang bukan *sekufu sayid* dengan alasan tidak sah nikah.⁴ Dari keterangan yang tim penulis kumpulkan dengan sejumlah informan keturunan *sayid* bahwa tidak sah nikah manakala keturunan *sayid* melakukan akad nikah dengan golongan yang bukan *sayid* khususnya perempuan '*syarifah*' dengan *ureueng* biasa. Karena tidak *sekufu* dengan memberi satu contoh 'tidak boleh bercampur beras dengan padi'.⁵

Hal senada dengan di atas, juga ditemukan dalam masyarakat Aceh Selatan, bahwa walaupun terjadi perkawinan antara *syarifah* dengan *ureueng biasa* (orang biasa), maka keluarga pihak *syarifah* tidak segan-segan memutuskan tali kekeluargaan plus tidak berhak menerima harta warisan. Dengan alasan *kafa'ah* atau tidak *sekufu* dan tidak sederajat.⁶

Namun fenomena ini, berbeda ketika golongan laki-laki *sayid* berkeinginan mempersunting calon istrinya dari golongan lain atau *ureueng* biasa. Bagi laki-laki punya sedikit kelonggaran, itupun harus berdasarkan musyawarah keluarga dan kerabat dekatnya. Dalam dilema tersebut oleh pihak *sayid* tidak lagi mempersoalkan masalah sah tidaknya nikah, ketidak *sekufuan*, bercampurnya beras dengan padi, dan lain sebagainya. Karena

persepsi mereka laki-laki *sayid* dapat mewarisi pertalian hubungan darah dengan menganut aliran *patrilinial*.



Keterangan :

▲ dan ● = golongan *sayid* atau *syarifah*
 △ dan ○ = *ureueng* biasa

Apabila keturunan *sayid* kawin dengan keturunan *ureueng* biasa, maka derajat ke-*sayid*-annya menjadi lebih rendah. Bila perempuan (*syarifah*) kawin dengan laki-laki biasa, maka anaknya bukan *sayid* atau *syarifah* lagi. Bila laki-laki *sayid* dengan perempuan biasa, anaknya adalah tetap *sayid* atau *syarifah* tetapi tidak murni lagi. Bagi orang tua golongan *sayid* cenderung mencari pasangan perkawinan putra-putrinya yang derajatnya sama dengannya. Jalan termudah ialah kawin dengan sepupu sendiri. Bagi perempuan *syarifah* tidak berani menerima tawaran cinta, pinangan, lebih lagi melakukan perkawinan dari laki-laki biasa, karena besar risikonya dan terikat dengan adat golongannya sebab pada masa lampau di Bambi penerimaan tawaran ini juga bisa ditentang oleh kaumnya. Kasus di bawah ini menunjukkan akibat dari perkawinan itu:

Perempuan X adalah seorang keturunan *sayid* amat dekat dengan seorang laki-laki *ureueng* biasa (Y), ia jatuh cinta pada laki-laki Y anaknya Q nantinya keturunan biasa. Ketika X mengemukakan rencananya untuk kawin dengan Y pada keluarganya (orang tua X), ternyata tidak disetujui, bahkan X diancam untuk diusir dari keluarga bila

⁴ Abdurrahman Patji, 1988. "Asimilasi Golongan Etnis Arab" dalam M. Bambang Pranowo dkk., *Steriotip Etnik, Asimilasi, Integrasi Sosial*, (Jakarta: Pustaka Grafika, 1988), hlm. 185. Lihat juga Snouck Hurgronje, *The Achehnese*, Translated by A.W.S. O' Sullivan, Late E.J. Brill, (Leiden: 1906), hlm. 222.

⁵ Sardani, "Perubahan Status dan Peranan Elit Sosial pada masyarakat Bambi Kabupaten Pidie, Aceh", *Tesis*, (Bandung : PPs. UNPAD, 2000). Hlm. 71.

⁶ Rasul Hamidy, *Kelopok Etnis Arab di Aceh Selatan*, (Banda Aceh : LRS IAIN Ar-Raniry, 1983) hlm.16.

melanjutkan niatnya itu. Oleh karena X memang sudah benar-benar senang dan saling mencintai pada Y, maka terjadilah kawin lari. Setelah setahun di perantauan X mencari jalan keluar untuk bisa kembali kekeluarganya, tetapi selalu diancam oleh keluarganya, dan memang benar-benar tidak diterima atau diusir, bahkan X diancam lagi dengan tidak mendapat harta pusaka. Lalu mereka memutuskan untuk hidup bersama Y di perantauan. Anehnya problema di atas tidak berlaku bagi laki-laki keturunan *sayid* yang kawin dengan *ereueng* perempuan biasa.⁷

Deskripsi di atas adalah model kekerabatan mazhab *patrilinial*, bukan *matrilinial* tetapi mengapa mazhab *matrilinial* (keturunan Nabi melalui putrin-Nya Fathimah) yang lebih menonjol dalam kekerabatan *sayid* di Aceh, bukankah orang Arab juga amat mengakui garis keturunannya dari pihak ayah. Masalah ini mungkin perlu adanya penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang golongan *sayid* (keturunan Arab) di Aceh.

Sebutan gelar yang sering disebut *habib* adalah gelar penghormatan yang lebih khusus bagi para *sayid*. Gelar ini diberikan kepada mereka yang pantas, karena kealiman, kesalehan dan ketokohnya. Istiqamah dalam pendirian, sebahagian dari *habib* dianggap keramat. Orang atau siapa saja pasti tidak akan berani macam-macam (pelecehan, menipu dan cemooh) kepada *habib* karena takut kualat atau murka yang berakibat *kualat* atau fatal bagi dirinya. *Habib* memiliki sifat kepribadian santun, penolong, anti terhadap perbuatan dosa dan taqwa kepada Allah SWT. Pribadinyapun, tidak takut kepada siapa saja yang menantanginya kecuali Allah. Apapun risiko yang dihadapi ia tetap pada pendirian berani berbuat dan berani bertanggung jawab, keterangan ini diperoleh dari hasil wawancara tim penulis dengan informan (*Geuchik* di Bambi).

Perubahan Sosial dalam Status dan Peranan

Masyarakat Aceh amat meyakini kepada *sayid* yang mengklaim dirinya keturunan Nabi Muhammad saw, melalui putrinya Fathimah. Maka *sayid* dan keturunannya pada masa lalu mendapat predikat mulia, kharismatik, dan mereka mampu menjadi suri teladan kepada masyarakat luas, selalu berdiri di atas konsep '*amar ma'ruf nahi mungkar*'.

Masyarakat Aceh ketika itu, memandang golongan *sayid* sebagai cucu Muhammad saw, derajatnya tinggi, harus mendapat tempat terhormat, dicintai dengan dogma agama dalam meraih pahala dari Allah. Kehadiran mereka di tengah masyarakat adalah panutan, mekipun terkesan tertutup.

Anehnya pada zaman sekarang, posisi kemuliaan, kharisma, kewibawaan yang sejak dulu dipertahankan baik secara individual maupun golongan dengan gelar (*sayid*) sebagai simbol, kini hanya tinggal sebuah simbol minus nilai. Hal tersebut senada dengan pendapat Parsons, bahwa masyarakat manapun di dunia ini selalu mengalami perkembangan yang berarti pertumbuhan atau *growth* dan perubahan *change*.⁸ Sama halnya dengan apa yang dihadapi masyarakat Aceh khususnya *sayid* tentang perubahan yang berlandaskan gerak atau mobilitas dalam konteks status dan peranan *sayid* pada aspek keteladanan, kemuliaan, dan kekuasaan yang tidak mungkin dihindari.

Sebuah realitas yang pernah kami temukan, melalui sebuah penelitian dapat diasumsikan bahwa sekarang muncul kecenderungan terjadi mobilitas sosial pada status dan peranan *sayid* di Aceh. Terutama pada aspek keteladanan, kemuliaan dan atribut sosial. Hal ini bergeser diduga akibat dari kemajuan dan perkembangan masyarakat itu sendiri, baik aspek sosio-cultural, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan dan teknologi.

⁷ Sardani, *op.cit.*, hlm. 72-3

⁸ Talcott Parsons, *The Structure of Social Action*, (New York: The Free Press, 1951), hlm. 155.

Wacana

Dampak positif dari sebuah perubahan selalu ada, elit sosial yang memiliki kharismatik dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya dalam konsteks ksatria semakin memperkuat status dan peranan dalam struktur sosial. Para elit sosial cenderung menjadi panutan bagi komunitas masyarakat lainnya, sehingga menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan masyarakat seutuhnya.

Penutup

Sayid di Aceh adalah keturunan Arab dari Hadramaut, Yaman bagian selatan, mayoritas masyarakat di Arabia Selatan ini pengikut syiah (Ali bin Abithalib), dan mereka

adalah migran dari Irak. Tidak begitu jelas apakah benar mereka itu keturunan Nabi Muhammad Rasulullah SAW.

Konsekwensi sebuah perubahan, akrab terjadi dalam konteks apapun dan di mana pun masyarakat itu ada. *Sayid* yang dulunya begitu terhormat, mulia dan berkharisma di mata masyarakat Aceh. Eksistensi mereka dalam lintas sejarah begitu terpendang, terjaga, namun ketika perubahan terjadi dan hadir di tengah masyarakat luas, maka semua itu sulit dibendung. Status dan peranan mereka bergeser atribut sebagai gelar sosial berkurang nilainya sebab perubahan terus bergulir secara terus menerus dalam peredaran waktu.

Sardani, S.Ag., M.Si, adalah Dosen tetap pada Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sedangkan Drs. Teuku Abdullah, Sm.Hk adalah dosen tetap pada FKIP Unsyiah Banda Aceh.

Aceh Timur dalam Perang Kemerdekaan 1945 – 1949 (Suatu Tinjauan tentang Basis Ekonomi dan Penampungan Pengungsi)

Oleh Zulfan

Pendahuluan

Perang kemerdekaan Indonesia tahun 1945 – 1949 merupakan salah satu peristiwa yang terjadi dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, khususnya pada waktu pembentukan dan penyusunan negara Republik Indonesia setelah proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa ini merupakan perjuangan yang mempunyai nilai yang amat penting dalam perkembangan bangsa Indonesia.

Perjuangan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada waktu itu meliputi seluruh wilayah Indonesia termasuk di dalamnya daerah Aceh. Sejak awal proklamasi daerah Aceh telah ditetapkan sebagai salah satu keresidenan dalam wilayah propinsi Sumatera. Penentuan statusnya berlaku surut sejak tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai residennya ditetapkan Teuku Nyak Arief, sedangkan ibukota keresidenan adalah Kutaraja (sekarang Banda Aceh).

Keresidenan Aceh yang terdiri dari beberapa daerah kabupaten, pada Agresi Belanda yang pertama dan yang kedua turut aktif dalam mempertahankan kemerdekaan. Salah satu adalah Kabupaten Aceh Timur dengan Ibukotanya Langsa selama perang kemerdekaan Indonesia di Aceh turut juga memegang peranan penting.

Aceh Timur Sebagai Basis Ekonomi

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 daerah-daerah Aceh sebagai bagian dari pemerintah RI harus berusaha berdiri sendiri dalam hal perbelanjaan negara baik untuk memenuhi perlengkapan pemerintah maupun alat-alat senjata. Tindakan itu dilaksanakan dengan mengaktifkan

potensi-potensi ekonomi seperti perkebunan, pertambangan dan perdagangan luar negeri.¹

Daerah Aceh Timur sesuai dengan letak geografi yang strategis baik dengan jalur hubungan luar negeri maupun dengan hasil-hasil kekayaan alam yang cukup memadai. Potensi-potensi tersebut memegang peranan penting dalam bidang ekonomi. Mengenai hasil perkebunan karet untuk membiayai perjuangan kemerdekaan, Abdullah Hussain (1984) mengemukakan bahwa Langsa merupakan modal untuk Aceh karena daerah tersebut cukup banyak menyimpan stok getah dan minyak kelapa sawit, karena di daerah inilah terdapat estate-estate yang besar dan stoknya tidak diganggu oleh Jepang.²

Hal ini dimungkinkan karena daerah Aceh Timur mempunyai kebun-kebun karet dan kelapa sawit yang luas, seperti perkebunan Taming, perkebunan Langsa, perkebunan Idi, perkebunan Peureulak. Selain perkebunan-perkebunan swasta asing itu, juga ada perkebunan rakyat sehubungan dengan adanya pendapatan daerah dari sektor perkebunan sehingga rakyat Aceh Timur juga melakukan perdagangan dengan Malaysia dan Singapura.

Pertukaran barang-barang dengan luar negeri merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh rakyat Aceh Timur karena Belanda pada waktu itu telah menguasai Selat Malaka dan dijaga dengan ketat setiap adanya usaha-usaha perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan tersebut juga tidak dapat

¹ S.M. Amin, *Kenangan-kenangan dari Masa Lampau*, (Jakarta: Praduya Paramita, 1978), hlm. 104.

² Abdullah Hussain, *Sebuah Perjalanan*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1984), hlm. 234.

Wacana

dilupakan peranan Angkatan Laut Republik Indonesia di daerah Aceh, yang mempunyai tugas untuk memelihara dan menjaga keamanan pantai, serta kepada armada perdagangan yang telah menembus blokade Angkatan Laut Belanda untuk mencari alat-alat perjuangan, senjata dari luar negeri.³

Setelah Belanda melancarkan agresi pertama yang berhasil menduduki dan menguasai pelabuhan-pelabuhan di Jawa dan Sumatera, kegiatan perdagangan yang ditempuh melalui penerobosan blokade Angkatan Laut Belanda mulai berkurang, hal tersebut dikarenakan Angkatan Laut Belanda menjaga ketat hubungan Indonesia dengan luar negeri dengan cara mengadakan blokade di perairan Indonesia. Kemudian daerah operasi dan ruang gerak kapal-kapal armada perdagangan menjadi sempit. Walaupun demikian usaha-usaha perdagangan terus dijalankan dengan memindahkan daerah-daerah operasi ke pelabuhan yang terletak di pantai timur Aceh yaitu Langsa.

Pemindahan daerah operasi tersebut dikarenakan daerah Aceh merupakan salah satu daerah Indonesia yang tidak dapat diduduki dan dikuasi oleh Belanda, dan daerah Aceh juga mempunyai sumber-sumber daya alam yang laku di pasaran internasional, seperti minyak kelapa sawit, karet dan lada. Sumber-sumber alam tersebut semuanya dapat dibarter dengan mudah dengan barang-barang dari luar negeri, seperti barang-barang dari Malaysia dan Singapura. Dengan pemindahan daerah operasi penembusan blokade Angkatan Laut Belanda maka daerah Aceh Timur menjadi basis penerobosan Angkatan Laut Belanda, penerobosan tersebut dilaksanakan di sepanjang pesisir pantai Tamiang. Penerobosan pertama dilaksanakan oleh Speed Boat PP 58 LB yang dipimpin oleh Mayor John Lie dengan menempatkan pangkalan yang pertama di Sungai Tamiang/Peukan Seuruwe.

Penerobosan blokade Angkatan Laut Belanda tersebut berhasil dijalankan dengan baik sehingga dapat memasukkan alat-alat perjuangan ke daerah Aceh. Adapun hasil penerobosan itu, Angkatan Laut Republik Indonesia daerah Aceh telah berhasil mempersenjatai anggotanya terutama yang bertugas di Station Angkatan Laut Langsa yang berjumlah lebih kurang 500 orang. Selain dari itu juga dapat menutupi kekurangan peralatan perlengkapan kantor, pakaian dan buku-buku pelajaran. Dalam bidang kesehatan juga dapat dipenuhi karena persediaan obat-obatan yang diperoleh dari perdagangan tersebut cukup banyak, selain untuk memenuhi keperluan Angkatan Laut Republik Indonesia daerah Aceh juga diberikan untuk menunjang perjuangan rakyat Aceh dan untuk pemerintah darurat Republik Indonesia.⁴

Setelah Mayor John Lie diangkat menjadi Kepala Pertahanan Luar Negeri, kapal PP 58 LB diserahkan kepada O.P. Koesno. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kapten O.P. Koesno juga berhasil menembus blokade Belanda di Selat Malaka sehingga berhasil memasukkan senjata ke daerah Aceh yang berpangkalan tetap di Sungai Tamiang. Tindakan yang sama juga dilaksanakan oleh Speed Boat 62 di bawah pimpinan Kapten Mahdi yang berpangkalan di Limau Mengkur, Speed Boat 63 di bawah pimpinan Peutua Bungsu, Speed Boat 66 di bawah pimpinan Mayor Simon.

Keberhasilan perdagangan yang dilaksanakan melalui penerobosan blokade Belanda dari pangkalan-pangkalan yang tersebut di atas juga tidak bisa dipisahkan dari peranan Angkatan Laut Station Langsa. Dengan demikian daerah Aceh Timur merupakan suatu daerah pemasukan perlengkapan pemerintah baik alat-alat perkantoran maupun alat-alat persenjataan yang sangat besar artinya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.⁵

³ Zamzulis Ismail, *Angkatan Laut Republik Indonesia Daerah Aceh (1945 - 1950)*, (Jakarta: Dinas Sejarah TNI Angkatan Laut, 1980), hlm. 38.

⁴ *Ibid.*, hlm. 55.

⁵ Abdullah Hussain, *Peristiwa*, (Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1965), hlm. 85.

Sehubungan dengan penjelasan di atas daerah Aceh Timur juga aktif dalam pengendalian perekonomian negara Republik Indonesia, dengan membentuk Ekonomi Negara Republik Indonesia (ENRI) di bawah pimpinan Buyung Jafar dan M. Risyat, badan ekonomi tersebut merupakan cabang dari Medan.

Untuk menyelesaikan persoalan alat tukar di Aceh Timur, menurut SM. Amin (1978): Sebelum pengeluaran uang kertas Propinsi Sumatera Utara, Oesman Adamy tidak sabar menunggu tindakan pemerintah dalam persoalan kekurangan alat tukar ini, atas inisiatif sendiri mencetak uang kertas yang dipergunakan sebagai alat pembayaran. Uang tersebut laku dalam masyarakat dan dianggap sebagai uang yang sah.⁶

Kemudian Aceh Timur juga banyak memberi andil kepada perjuangan kemerdekaan dari hasil pertambangan minyak bumi. Dalam hal tersebut Abdullah Hussain (1984) mengatakan pemerintah daerah Aceh telah memanfaatkan tambang minyak Pangkalan Berandan sebagai sumber keuangan yang utama. Tambang minyak tersebut ditinggalkan oleh Jepang setelah melaksanakan sistem bumi hangus. Tambang minyak tersebut berhasil diperbaiki oleh buruh-buruh Indonesia dan dapat memperoleh hasil yang menguntungkan. Sumber bahan mentah untuk pabrik minyak tersebut berasal dari Aceh Timur seperti Julok, Peureulak, dan Rantau Kuala Simpang dan dialirkan melalui pipa ke Pangkalan Berandan untuk diproses menjadi beberapa jenis minyak jadi dan dipergunakan untuk keperluan perjuangan kemerdekaan. Untuk menghindari dari ancaman Belanda, pada tanggal 13 Agustus 1947 pabrik minyak Pangkalan Berandan itu terpaksa dibumi hanguskan dan sebelumnya peralatan-peralatan dari pabrik minyak tersebut banyak dipindahkan ke tambang minyak Rantau Kuala Simpang dan Rantau Panjang Peureulak Aceh Timur, pemindahan alat-alat perlengkapan tersebut membawa pengaruh besar terhadap kedua tambang

minyak tersebut yaitu dapat menambah jumlah produksi dan bahan bakar minyak bagi kepentingan militer dan masyarakat umum. Pemindahan dan pembangunan kilang minyak ke Peureulak dimaksudkan sebagai pengaman unit produksi dan logistik seandainya tambang minyak Rantau Kuala Simpang terpaksa harus dibumihanguskan.

Setelah proklamasi, seluruh kekuasaan Jepang di Aceh Timur termasuk perusahaan pertambangan dapat diambil alih oleh pemerintah Indonesia di Aceh, khususnya di Aceh Timur. Sebelumnya Jepang telah merencanakan untuk membumihanguskan tambang minyak yang ada di Aceh Timur, tetapi dengan usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat, tambang minyak tersebut dapat diselamatkan dan dijalankan oleh pemerintah.⁷

Pengambil alih kekuasaan tambang minyak Rantau Kuala Simpang dan Julok dipimpin oleh Tgk. Amir Husin Almujaheed dan Abdurrahman C.S dengan menghadapi tentara-tentara Jepang yang mempunyai senjata yang lengkap. Setelah tambang minyak tersebut dikuasai, dengan persetujuan Residen Aceh dan Gubernur Sumatera maka dibentuklah suatu organisasi tambang minyak Aceh dengan pimpinan umumnya: Tgk. Amir Husin Almujaheed, Kepala Lapangan: Abdurrahman C.S dan kedudukan kantornya berpusat di Langsa, Aceh Timur.

Setelah terorganisir tambang minyak tersebut dapat berproduksi kembali dengan memproduksi beberapa jenis minyak jadi. Hasil produksi minyak tersebut sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pemerintah dan untuk membiayai perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan.

Aceh Timur sebagai Basis Penampungan Pengungsi

Gerakan-gerakan pengacauan yang dilanjutkan dengan kegiatan agresi yang

⁶ SM. Amin., *op. cit.*, hlm. 107.

⁷ B. Wiwoho, *Pasukan Meriam Nukum Sanany Sebuah Pasak dari Rumah Gadang Indonesia Merdeka*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 223.

pertama dan kedua mengakibatkan tidak terjaminnya ketentraman dan keselamatan jiwa penduduk Sumatera Timur, sehingga mereka banyak meninggalkan daerahnya untuk mengungsi ke daerah lain yang dipandang lebih aman dan tentram terutama ke daerah Aceh yang merupakan satu-satunya daerah di Sumatera yang terhindar dari ancaman Belanda.

Selain dari keadaan Aceh yang aman juga merupakan daerah yang mudah dijangkau oleh penduduk Sumatera Timur, bahkan daerah Aceh Timur merupakan garis perbatasan dengan daerah mereka, sehingga penduduk dari Sumatera Timur lebih banyak mengungsi ke daerah Aceh dan khususnya di Aceh Timur.

Para pengungsi menempuh jalan melalui hutan menuju ke daerah Aceh Timur, terutama sekali ke Langsa yang diperkirakan lebih kurang sebanyak 300.000 jiwa. Selain yang bermukim di Aceh Timur ada juga yang meneruskan pengungsian ke Aceh Utara, Pidie, dan Aceh Besar (Saree). Dalam perjalanan, sebelum sampai ke daerah Aceh para pengungsi juga tidak luput dari gangguan pihak yang tidak bertanggung jawab yang merupakan pengkhianat kepada perjuangan kemerdekaan Indonesia. Adapun gangguan yang menimpa para pengungsi dalam perjalanan ke Aceh yaitu perampasan, pemaksaan dan pemerkosaan.⁸

Setelah para pengungsi sampai ke daerah Aceh Timur mereka disambut dan diperlakukan dengan penuh rasa persaudaraan secara ke-Islaman oleh rakyat Aceh dan khususnya masyarakat Aceh Timur. Menurut Abdullah Hussain (1984):

“Walaupun keadaan penghidupan rakyat sudah mulai sukar karena bahan-bahan makanan sudah berkurang sejak zaman Jepang, kemampuan yang kurang cukup tetapi rakyat Aceh dengan rela dan ikhlas telah menerima

kedatangan saudara-saudaranya yang mengungsi dari daerah Sumatera Timur yang menjadi jirannya, mereka yang taat kepada pemerintah Republik Indonesia, beramai-ramai mengungsi ke Aceh. Ada yang menampung pada kaum keluarganya dan yang paling banyak yang berkongsi tempat tinggal dengan orang-orang yang baru saja dikenalnya. Mereka tidak saja berkongsi tempat tinggal tetapi juga berkongsi bahan makanan apa yang ada.”⁹

Sehubungan dengan letak geografis daerah Aceh Timur yang berdekatan dengan daerah asal pengungsi, sehingga para pengungsi banyak yang bermukim di daerah Aceh Timur. Para pengungsi pada waktu itu terus menerus bermukim di Aceh Timur. Dengan demikian pemerintah daerah Aceh Timur membentuk panitia pengungsi di bawah naungan markas pertahanan Aceh Timur, Batalion Enam. Ketua dari panitia tersebut adalah Usman Adamy sebagai Ketua Umum, Ismail Usman sebagai Ketua Satu, Hamid Abdullah sebagai Sekretaris.

Selanjutnya melalui panitia penampungan dan pengaturan pengungsi tersebut, para pengungsi dimungkinkan menetap dengan sebaik-baiknya sehingga mereka tidak hanya bermukim pada satu tempat saja, tetapi merata di seluruh daerah Aceh Timur seperti di Kuala Simpang, Peureulak, Idi, dan Simpang Ulim. Selain dari itu panitia tersebut juga mengurus dan memberikan bantuan dalam bidang pekerjaan. Tindakan itu sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh para pengungsi. Para pegawai pemerintah diperbantukan pada kantor-kantor pemerintahan, para petani diberikan tanah untuk berkebun dan menyawah, para nelayan diberikan perlengkapan-perengkapan penangkapan ikan dan para ulama diperbantukan pada sekolah-sekolah agama dan umum.

Untuk mendapat bantuan dari masyarakat di luar daerah Aceh Timur. Tindakan

⁸ Kementerian Penerangan RI, *Republik Indonesia Popinsi Sumatera Utara*, (Jakarta: Kementerian Penerangan RI, 1955), hlm. 153.

⁹ Abdullah Hussin., *op.cit.*, hlm. 417.

mereka adalah menyebarkan seruan pertolongan ke daerah lain dan seruan itu mendapat perhatian masyarakat di luar daerah Aceh Timur, sehingga datang sumbangan-sumbangan dari seluruh daerah Aceh ke Langsa baik materil maupun spirituil untuk para pengungsi.

Penutup

Dalam periode tahun 1945 – 1949 masyarakat Aceh Timur sesuai dengan potensi alamnya baik dari hasil maupun letak geografisnya yang strategis telah memberikan kontribusi kepada negara Republik Indonesia yang meliputi tentang perbelanjaan negara dan

pengadaan alat-alat perjuangan. Kontribusi tersebut bersumber dari hasil-hasil perkebunan, pertambangan minyak tanah serta perdagangan luar negeri.

Selain dari itu daerah tersebut berperan penting sebagai basis penampungan pengungsi dari Sumatera Timur yang terdiri dari suku Jawa, Batak, Melayu dan Padang. Mereka diterima dengan rela dan ikhlas serta diperlakukan sebagai saudara sebangsa, sehingga tercipta kehidupan berdampingan yang harmonis antara masyarakat setempat dengan para pengungsi.

Drs. Zulfan, M.Hum. adalah Dosen tetap pada FKIP Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh

Perkebunan dan Perdagangan: Proses Integrasi Masyarakat di Sumatera Timur Abad ke-19 hingga Awal Abad ke-20

Oleh Sudirman

Pendahuluan

Pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20 Labuhan Deli dan Belawan menjadi bandar dagang dan pintu gerbang Sumatera Timur. Bandar itu mengalami perkembangan yang lebih pesat jika dibandingkan dengan bandar yang ada di pesisir barat Pulau Sumatera.

Dengan adanya bandar-bandar dagang tersebut, terjadinya interaksi antara pedagang-pedagang dari berbagai daerah, baik dari Nusantara maupun dari luar Nusantara. Untuk memperkokoh jaringan perdagangan pribumi dari dominasi para pedagang asing, para pedagang pribumi menggalang kerjasama perdagangan untuk "membendung" para pedagang asing yang lebih besar modalnya dan lebih moderen perlengkapannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu akibat dari perkembangan bandar-bandar dagang itu dapat mempererat hubungan persaudaraan antara sesama pedagang pribumi untuk melawan perlakuan yang tidak baik dari pedagang-pedagang asing. Dari sisi lain, terjadinya saling tukar pengalaman dan budaya antara pendatang dengan penduduk setempat, yang tentunya sangat besar manfaat bagi keduanya.

Selain sebagai proses integrasi dengan dibuka bandar dagang dan lahan perkebunan di beberapa daerah di Sumatera Timur, berpengaruh pula terhadap pertumbuhan dan komposisi penduduk dalam waktu yang relatif singkat jumlah penduduk

pribumi hampir dilampaui oleh jumlah buruh asing yang sengaja didatangkan oleh Belanda.¹

Perdagangan dan Perkebunan

Pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20 Labuhan Deli menjadi bandar dagang dan pintu gerbang Sumatera Timur. Perkembangan yang lebih cepat, terutama memasuki tahun 1870 dengan diizinkan oleh Belanda perusahaan swasta asing untuk membuka perkebunan di Sumatera Timur. Labuhan Deli yang terletak di pantai timur dan berhubungan langsung dengan Selat Malaka sehingga berkembang menjadi pelabuhan terbuka bagi para pedagang dari berbagai daerah. Berbagai jenis hasil perkebunan dikeluarkan melalui Labuhan Deli, kapal asing dan pribumi mengunjungi bandar itu untuk memperjualbelikan tembakau, karet, serat, teh, kelapa, lada hitam, pala, buah pinang, dan sebagainya.² Berbagai jenis sarana angkutan laut yang datang dan berangkat, seperti perahu dagang yang masih sederhana hingga perahu kapal yang moderen, kapal api, kapal motor, kapal layar serta kapal pemerintah Hindia Belanda.³

¹C. Lekkerkerker, *Land en Volk van Sumatra*, (Leiden : Voorheen E.J. Brill, 1916), hlm.14.

²J.A.M. van Cats Baron de Raet, "Vergelijking van den Vroegeren toestand van Deli, Serdang, en Langkat met de Tegenwoordigen", *Tijdschrift voor Indische Taal, Land, en Volkenkunde*, 23, 1876, hlm. 34.

³Scheepvaartbeweging Over 1907 Voor Zooveel de Jaarlijksche Algemeene Handelsstatistiek van Nederlandsch-Indie die doet Kennen", *Koloniaal Verslag van 1908*, hlm. 32.

Pada waktu itu, pelabuhan berfungsi sebagai tempat keluar masuk barang dagangan untuk perkembangan perniagaan, sosial, dan politik. Labuhan Deli dapat dikatakan sebagai kota bandar tempat perdagangan hasil perkebunan di pedalaman Deli sehingga menjadi posisi yang sangat penting di kawasan Sumatera Timur pada akhir abad ke-19. Fungsi dan peranan bandar itu melebihi bagian kota lain dan terbuka bagi perdagangan dunia. Posisi itu sama dengan bandar-bandar pantai lain di Asia umumnya yang berperan terhadap daerah pedalaman.⁴

Labuhan Deli merupakan jembatan penghubung antara daratan perkebunan Deli dan Selat Malaka. Secara geografis dan perdagangan luar negeri, Labuhan Deli dapat digolongkan sebagai bandar, yakni bandar yang dapat disinggahi kapal-kapal yang berbendera asing maupun berbendera laut nusantara, bebas tanpa sesuatu izin untuk memasukinya.⁵ Ditinjau dari sudut perdagangan, Labuhan Deli pada mulanya termasuk tipe *Feeder Point*, yakni bandar yang letaknya strategis di rute jaringan perdagangan dan berhubungan langsung dengan daerah penghasil barang komoditi. Bandar itu merupakan tempat pengumpulan barang komoditi utama yang berasal dari daerah pedalaman Sumatera Timur. Barang hasil perkebunan diangkut ke kawasan pantai timur Sumatera, dan Labuhan Deli menjadi pusatnya.

Pada dasarnya pantai timur Sumatera telah menjadi jalur pelayaran semenjak lama sebelum perkembangan Labuhan Deli dan Belawan. Perairan Selat Malaka yang sangat strategis dilalui oleh kapal yang berlayar dari

Timur ke Barat dan sebaliknya. Kapal-kapal Tiongkok yang melakukan pelayaran ke Asia Barat, Afrika, dan Eropa akan melewati Selat Malaka. Oleh karena itu, menurut Kenneth R. Hall, Selat Malaka salah satu jaringan perdagangan di Asia Tenggara.⁶

Selama abad ke-18 wilayah Sumatera Timur belum dimasuki oleh pengusaha asing, kecuali hanya dalam bentuk perjanjian politik pada abad ke-19. Baru setelah itu para pengusaha asing masuk ke pulau Sumatera sebagai alternatif mengembangkan perkebunan. Kesempatan itu semakin terbuka karena dapat bekerjasama dengan para penguasa setempat yang memberikan konsesi tanah seluas-luasnya. Untuk itu, pada tahun 1863 pemerintah Hindia Belanda telah memberikan kesempatan kepada para pemilik modal, baik yang berasal dari pengusaha Belanda maupun pengusaha bangsa asing lainnya untuk menanam modalnya di Sumatera Timur. Pada waktu itu, pemerintah Belanda memberi kesempatan kepada Jacobus Nienhuys, seorang pemilik modal asal Belanda untuk menanamkan modalnya di Sumatera Timur, kemudian diikuti oleh pengusaha lainnya untuk mendirikan perkebunan besar dengan menanam jenis tumbuhan yang bernilai ekonomis, seperti tembakau, kopi, kelapa sawit, karet, teh serta lainnya. Pada tahun 1869 Jacobus Nienhuys mendirikan *Deli Maatschappij* yang mengelola sekitar 23 perkebunan, seperti tembakau, kelapa sawit, coklat, kina, kopi, kapas, dan karet. Pada tahun selanjutnya, 1879, J.T. Cremer mendirikan *Deli Planter Vereniging* dengan tujuan mengurus kepentingan bersama pekebun dan tuan kebun Belanda, seperti bidang administrasi, perburuhan, keamanan, dan masalah hak atas tanah.⁷

⁴ Peter Reeves, Frank Broeze, dan Mc. Person, "Studying the Asian Port City", dalam Frank Broeze (ed), *Brides of the Sea: Port Cities of Asia from the 16—20 Centuries*, (Kensington: New South Wales University Press, 1989, hlm. 34.

⁵ Herman A. Carel Lawalata, *Pelabuhan dan Niaga Pelayaran (port operation)*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm. 45.

⁶ Kenneth R. Hall, *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia*, (Honolulu: University of Hawaii, 1985) hlm. 224.

⁷ Karl J. Pelzer, *Planter and Peasants: Colonial Policy and the Agrarian Struggle in East*

Salah satu daerah pemasaran hasil perkebunan itu adalah Singapura. Hubungan pelayaran dan perdagangan antara Labuhan Deli dengan Singapura berkembang pesat.

Unsur ekonomi salah satu pendorong pemerintah Hindia Belanda untuk melakukan ekspansi ke luar pulau Jawa. Faktor lain tidak dapat dipisahkan dari kegiatan Inggris dalam bidang perdagangan di Selat Malaka. Semenjak awal abad ke-19 perdagangan Inggris di Selat Malaka mengalami kemajuan yang pesat. Oleh karena itu, para pedagang dari Sumatera Timur dan sekitarnya, seperti Deli, Serdang, Langkat, Minangkabau serta Siak secara diam-diam melakukan hubungan perdagangan dengan orang Inggris di Penang.⁸

Kemajuan yang terjadi di Labuhan Deli sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi pantai barat Sumatera Timur yang berpusat di Sibolga. Kegiatan ekonomi dan perdagangan yang dahulu berpusat di bandar Sibolga menjadi terpecah. Hal itu disebabkan banyak pedagang dan petani penghasil barang komoditi berdagang langsung ke pantai timur atau menjadi tenaga kerja perkebunan. Para pedagang asing yang biasanya berlayar ke Sibolga beralih ke pantai timur. Namun pada tahun 1890 Sultan Deli memindahkan pusat pemerintahan ke Medan,⁹ sehingga pusat perdagangan dan pelayaran pun pindah ke Belawan. Belawan kemudian semakin berkembang pesat, apalagi setelah pemerintah membuka secara resmi pada tahun 1922.

Pertumbuhan bandar Belawan pada mulanya tidak terlepas dari terbentuknya kota Medan, namun sebaliknya perkembangan kota itu sangat dipengaruhi oleh bandar Belawan sebagai pintu gerbang Nusantara di bagian

utara pulau Sumatera. Orang-orang Cina diberi kesempatan oleh pihak perkebunan untuk menjadi buruh dan leveransir perkebunan, seperti sayuran, daging babi, barang kebutuhan harian, dan sebagainya. Pada tahun 1879, berpindah pula asisten residen Deli dan para pamongpraja Belanda dari Labuhan Batu ke Medan. Selain itu, kedatangan para kuli dan penduduk daerah lain ke Sumatera Timur, sehingga Medan menjadi ramai, seperti Kesawan, tanah lapang *esplanade*, Binuang, Tebingtinggi, dan lain-lain.¹⁰

Pada tahun 1922, dengan diresmikan bandar Belawan oleh pemerintah, sehingga menjadi bandar yang ramai dan semakin berfungsi untuk mengeksport barang komoditi perkebunan Deli dan sekitarnya. Pada dasarnya bandar Belawan ini dibuka oleh pemerintah Hindia Belanda untuk gerbang ekspor komoditi pantai timur, dan berperan sebagai pelabuhan Samudera untuk Sumatera bagian utara. Untuk mendorong alih kapal melalui pelabuhan ini, maskapai pelayaran Hindia Belanda memberlakukan tarif terusan serendah mungkin sebagaimana yang berlaku di Singapura.

Bandar Belawan semakin banyak dikunjungi oleh kapal dagang asing, seperti Belanda, Inggris, Cina, Pulau Penang, Singapura, Thailand, Jerman, Jepang, dan lain-lain. Sedangkan kapal pribumi berasal dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Aceh, pulau Jawa, dan sebagainya. Bagi penduduk pribumi, jaringan perdagangan dan pelayaran itu merupakan salah satu faktor munculnya perbedaan kepentingan antara pribumi dengan pedagang asing.¹¹ Oleh karena itu, hubungan antara sesama pedagang dan pelayar pribumi menciptakan suatu kekuatan untuk dapat bersaing dengan pedagang asing.

Perkembangan kota Medan dan

Sumatra 1863--1947, (The Hague: Martinus Nijhoff, 1982), hlm. 31.

⁸ Muhammad Nur, "Bandar Sibolga di Pantai Barat Sumatera pada Abad ke -19 hingga Pertengahan Abad ke-20, *Disertasi*, Program Pascasarjana Fasa UI, 19 Agustus 2000, hlm. 311.

⁹ Usman Pelly, dkk., *Sejarah Sosial Daerah Sumatera Utara Katamadya Medan*, (Jakarta: Depdikbud, 1984), hlm. 8.

¹⁰ *Gids voor de Oostkust van Sumatra (Deli)*, 1940, hlm. 28.

¹¹ Muhammad Nur, *op. cit.*, hlm. 342.

bandar Belawan yang begitu cepat menarik para pedagang dari seluruh jalur pelayaran. Para pelayar dari kawasan pantai barat Sumatera juga beralih ke bandar Belawan, seperti Padang dan Sibolga karena sebelum itu, barang komoditi Sumatera Timur dikapalkan melalui Sibolga atau Barus. Namun perkembangan ekonomi yang sangat cepat di pantai timur serta semakin lengkapnya fasilitas bandar Belawan adalah salah satu faktor yang membuat kapal-kapal di bandar Sibolga beralih ke Belawan.¹²

Inggris ternyata berhasil mengembangkan Singapura dan penang sebagai pelabuhan *entrepot*. Perkembangan Singapura dan Penang di bawah Inggris merupakan salah satu faktor bagi Belanda untuk membuka jaringan pelayaran KPM dan sekaligus membuka Sumatera Timur untuk daerah perkebunan.

Pada tahun 1942 pelayaran swasta antarpulau Nusantara semakin berkurang. Kapal KPM yang berlayar di Nusantara banyak yang ditenggelamkan oleh Jepang. Sebagian dari kapal Belanda itu melarikan diri ke India dan Australia.

Proses Integrasi

Dalam sejarah sebuah negara bahari, bandar pelabuhan memainkan peranan penting bukan hanya ditinjau dari segi ekonomi dan politik, tetapi juga dari segi kebudayaan dan proses integrasi.

John Anderson, sekretaris Gubernur Inggris di Penang, mengadakan peninjauan ke daerah Deli pada tahun 1822, menyebutkan bahwa tembakau merupakan hasil tanaman yang diekspor ke penang. Terdapat juga tanaman-tanaman jenis lain, seperti tebu, padi, jagung, kapas, nira dan pisang yang merupakan tanaman rakyat.

Penduduk asli pada waktu itu, yaitu suku Melayu, Batak Toba, Simalungun, Karo

serta Mandailing. Ketika perkebunan Belanda mulai dibuka, masyarakat di daerah itu masih menganut sistem ekonomi pedesaan. Setelah dibuka perkebunan secara besar-besaran menyebabkan penduduk yang tinggal di daerah itu dipindahkan tanpa mendapat ganti rugi tanah yang memadai.

Penyerobotan tanah penduduk untuk kepentingan perkebunan itu telah mengakibatkan antara lain, terjadi hubungan yang tidak harmonis antara pengusaha Belanda dengan masyarakat sekitar. Oleh karena itu,¹³ ketika pihak perkebunan Belanda membutuhkan tenaga kerja untuk diperkerjakan di perkebunan, penduduk setempat tidak mau bekerja sebagai buruh perkebunan.

Semenjak Nienhuys membuka usaha perkebunan, tenaga kerja dari luar pun telah dimulai, yakni orang-orang Cina yang didatangkan dari Penang, Malaysia. Namun setelah ada protes dari pengusaha pertambangan Malaysia dan pemerintah kolonial Inggris, Belanda kemudian mendatangkan tenaga-tenaga kerja baru dari pulau Jawa untuk diperkerjakan di perkebunan. Jumlah Tenaga kerja tersebut hampir setiap tahun meningkat.

Gelombang tenaga kerja yang masuk ke perkebunan-perkebunan yang berasal dari luar daerah itu, dapat dipahami bahwa dalam waktu yang relatif singkat Sumatera Timur telah menjadi tempat perantauan yang sangat padat. Daerah ini menjadi tempat bertemunya berbagai suku dari dalam negeri dan orang-orang asing dari Asia dan Eropa. Orang dari Nusantara, misalnya Batak, Melayu, Bugis, Jawa, Banjar, dan lain-lain. Demikian juga orang Asia yang datang maupun sengaja didatangkan, seperti orang-orang Cina, India, Jepang, Siam, dan sebagainya.

Perkembangan perkebunan besar di daerah sekitar Medan telah berubah dari tempat yang sepi dan jarang penduduk

¹² Thee Kian Wie, *Plantation Agriculture and Export Growth an Economic History of East Sumatra 1863-1942*, (Jakarta: Leknas LIPI, 1977), hlm. 41.

¹³ Usman Pelly, dkk., *Interaksi Antarsuku Bangsa dalam Masyarakat Majemuk*, (Jakarta: Depdikbud, 1989), hlm. 191-192.

menjadi tempat yang ramai. Pertumbuhan usaha Belanda di bidang tembakau berkembang dengan pesat. Usaha Belanda tidak hanya di bidang tanaman tembakau saja, tetapi juga di bidang lain, seperti perkapalan, perdagangan, industri, bangunan serta perbankan.

Perusahaan-perusahaan segera bermunculan, antara lain perkeretaapian, bangunan (jalan-jalan, jembatan, dan gedung-gedung). Perluasan urusan perkapalan sehingga pelabuhan-pelabuhan yang ada seperti Belawan menjadi bertambah ramai dengan datangnya berbagai suku atau etnis dari berbagai daerah.

Kehadiran tenaga kerja ke Sumatera Timur seperti orang Jawa, mendirikan kampung-kampung sekitar perkebunan ternyata sangat disenangi oleh orang-orang Melayu sebagai pemilik tanah. Sebab pada dasarnya tanah tersebut milik penduduk asli dan apabila telah diokupasi akan menambah penghasilan orang-orang Melayu melalui bagi hasil dari pengusahaan tanah tersebut. Hal ini, merupakan salah satu sebab "berterimanya" kehadiran orang Jawa di sekitar mereka. Di samping orang Melayu sendiri tidak senang menjadi "kuli kontrak" di perkebunan Belanda.¹⁴

Kehadiran orang Jawa tersebut tidak saja menguntungkan orang Melayu, tetapi juga bagi etnis lain, seperti orang Batak Mandailing dan Batak Toba. Masuknya orang Batak Mandailing dan Batak Toba ke perkebunan yang pada dasarnya tidak disukai oleh pengusaha Belanda, melalui perembesan yang dilakukan melalui jalan melingkar, yaitu melalui "kampung Jawa". Setelah mereka "menjawabkan" diri baru masuk ke perkebunan.¹⁵

Dapat dipahami bahwa dengan berkembang perkebunan dan bandar dagang dapat menjadi salah satu faktor terjadinya

interaksi antara berbagai suku atau etnis dari Nusantara di Sumatera Timur. Kegiatan di pelabuhan, adanya pedagang beserta barang dagangannya yang keluar masuk pelabuhan, adanya pembeli dan penjual serta buruh pelabuhan. Sudah tentu di antara mereka itu kadangkala tidak hanya sekedar berdagang, tetapi dapat saja terjadi dalam hubungan yang lebih jauh, seperti hubungan perkawinan dan penyebaran agama.

Demikian juga halnya dengan perkebunan, para pekerja yang datang dari berbagai daerah yang kemudian bertemu di suatu tempat (perkebunan), tentu sangat mungkin mereka saling bergaul dan berkomunikasi. Selain itu, adanya orang-orang yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari untuk orang yang ada di sekitar perkebunan sehingga lebih dimungkinkan lagi terjadinya interaksi di antara mereka.

Penutup

Ada beberapa faktor yang menyebabkan perkembangan bandar Belawan yang sangat cepat. Perdagangan dan pelayaran salah satu faktor tersebut. Semenjak dibukanya Terusan Suez yang menghubungkan laut Merah dengan laut Tengah, dengan demikian rute pelayaran antara Nusantara dan Eropa semakin dekat. Banyak kapal Eropa yang berlabuh di Singapura dan Penang melanjutkan pelayarannya ke Belawan.

Akibat dari berkembangnya bandar Belawan dan dibukanya lahan perkebunan di beberapa daerah di Sumatera Timur, sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan penyebaran komposisi penduduk serta proses integrasi. Satu hal yang perlu dicermati bahwa sangat sedikit penduduk lokal yang mau menjadi buruh di perkebunan. Oleh karena itu, tenaga kerja di perkebunan kebanyakan berasal dari luar daerah Sumatera Timur, seperti Cina, Jawa, Keling, dan Siam.

Penolakan penduduk setempat untuk menjadi tenaga kerja perkebunan bukan karena malas, tetapi suatu bentuk protes terhadap kepentingan orang asing di daerah

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

Sumatera Timur. Orang Melayu Sumatera Timur, Melayu Pesisir Barat, dan Minangkabau adalah salah satu bentuk integrasi antaretnis Nusantara dalam memprotes kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda. Pada umumnya penduduk setempat memilih untuk melakukan perdagangan, nelayan, pialang. Bagi penduduk yang memilih pekerjaan melaut, mereka berinteraksi dengan pedagang Nusantara lainnya, seperti Semenanjung Melaka, Banten, Bugis, Makassar, Maluku, dan sebagainya. Namun harus diakui bahwa perkembangan bandar pelabuhan yang begitu pesat sebagai salah satu akibat dari peningkatan produksi perkebunan. Barang-barang komoditi perkebunan itu dikelola oleh perusahaan-

perusahaan perkebunan setelah ditingkalkan oleh kolonial Belanda.

Pembauran suku-suku bangsa di daerah perkebunan dan pelabuhan mengakibatkan dibutuhkannya sarana komunikasi. Bahasa Melayu ternyata dapat diterima sebagai jalan "kompromi" dalam komunikasi antaretnis yang ada di Sumatera Timur pada waktu itu.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa perkebunan dan perdagangan di Sumatera Timur pada waktu itu dapat menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya proses integrasi antara sesama penduduk pribumi dengan pendatang lain dari Nusantara.

Sudirman, S.S. adalah tenaga teknis (peneliti) pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.

Peranan Barus sebagai Pusat Perdagangan di Wilayah Pantai Barat Sumatera Utara pada Abad XVII - XIX

Oleh Seno

Pendahuluan

Jika kita telusuri jejak-jejak masa lalu Barus¹, kita akan tahu bahwa kota kecil di wilayah Pantai Barat Sumatera Utara tersebut, dahulunya merupakan bandar pelabuhan yang sangat ramai. Kota tersebut terletak di kaki pegunungan Bukit Barisan, di utara Teluk Tapian Nauli², pantai Barat Pulau Sumatera³, berada pada ketinggian antara 1-50 meter di atas permukaan laut⁴. Posisi Kecamatan Barus berada antara 2° 00' Lintang Utara dan antara 98° 25' 85" Bujur Timur⁵.

Kota Barus mempunyai luas sekitar 7, 2 km² atau 1,04 % luas Kecamatan Barus. Mengingat letaknya yang menghadap ke Samudra Hindia dan diapit oleh dua buah tanjung yang menjorok ke laut, yaitu Tanjung Kepala Ujung dan Tanjung Silabu, menyebabkan Barus menjadi bandar yang sangat strategis.⁶

¹ Sekarang, Barus terdiri dari lima desa, yaitu Desa Padangmasiang, Batugerigis, Pasarterendam, Kedaigadang dan Desa Sigambo-gambo. Lihat Budisantoso, et. al., *Studi Pertumbuhan dan Pemudaran Kota Pelabuhan : Kasus Barus dan Sibolga*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjenbud Dirjarahnitra, 1994/1995), hlm.11.

² E.E.W.G. Schroder, *Memorie van Overgave van de Residentie Tapanoeli, Sumatra*, 1920, hlm. 44.

³ Laporan Utama "Sibolga Menggapai Adipura", dalam *Pesisir Nauli*, No. 23/II/Mei / 1996, hlm. 36-37.

⁴ E. Francis, "Korte Beschrijving van het Nederlandsch Grongebied ter Westkust van Sumatra 1837", dalam *T.N.I.* No. 2, bagian 1. (Batavia-Groningen : Lansdruckerij, 1839), hlm. 36.

⁵ Data diambil dari Statistik Kantor Kecamatan Barus, Tahun 2000.

⁶ Budisantoso, et.al., *op.cit.*, hlm. 9.

Di Barus terdapat muara yang berasal dari beberapa sungai yang berhulu di daerah pedalaman. Sungai-sungai tersebut di antaranya yaitu : Aek Hantu, Aek Pane, Aek Sibuluh, Aek Sibintang, Aek Sipauhat, Aek Busuk, Aek Maco (Batunguar), Aek Sirahar dan Aek Tapus⁷. Pesisir Bandar Barus ini terletak di dataran rendah yang sempit⁸.

Kedalaman perairan pantai Barus dari tepi hingga jarak sekitar 2 km ke arah laut lepas sekitar 0 - 3 meter. Selanjutnya kedalaman sampai jarak 4 - 5 km sekitar 3 - 10 meter. Dengan kondisi perairan seperti ini, kapal dagang tidak dapat merapat ke pantai, tetapi harus berlabuh sekitar 100 meter dari pantai. Kegiatan bongkar/muat barang dari dan ke kapal harus menggunakan sampan yang berkapasitas 10 - 200 kg. Pada musim angin tenggara atau angin selatan bertiup kencang sehingga kegiatan bongkar/muat barang tidak dapat dilakukan.

Hasil bumi yang diekspor melalui Bandar Barus diambil dari pedalaman melalui sungai-sungai yang mengalir dari dataran tinggi Toba. Bandar ini dikenal oleh para pedagang domestik maupun pedagang asing

⁷ "Kantor Kecamatan Barus", *Arsip Kecamatan. Barus* : 2000, tidak diterbitkan.

⁸ William Marsden. *Sejarah Sumatra*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 10. Lihat juga Christine Dobbin, *Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah, Sumatera Tengah 1748-1847*, Jakarta : INIS, 1992, hlm. 2. Jan Wissemann Christie, "Trade and State Formation in The Malay Peninsula and Sumatra, 300 B.C. - A.D. 700", dalam J. Kathirithamby Wells & John Villiers, ed. *Southeast Asian Port and Polity Rise and Demise*, National University of (Singapore : Singapore University Press, 1990), hlm. 53.

lewat pelayaran. Setelah barang-barang dagangan tersebut dikumpulkan di Pelabuhan Barus, kemudian dijual lagi kepada para pedagang asing yang berasal dari Portugis, Belanda, Inggris, Arab, Gujarat, Cina dan Mesir⁹. Para pedagang Barus, di samping berdagang dengan orang asing, juga berdagang dengan pedagang domestik dari etnis lain, seperti etnis Batak, Minangkabau, Aceh, Bengkulu dan Bugis.¹⁰ Mereka tertarik berdagang di Bandar Barus karena barang-barang yang mereka peroleh bermutu tinggi. Tidak mengherankan jika bandar tersebut sangat ramai dikunjungi para pedagang. Bahkan C. Nooteboom sendiri mengatakan bahwa pelayaran nusantara di perbatasan Samudra Hindia berpangkalan di Barus.¹¹

Lokasi Pelabuhan

Mengingat sering terjadinya endapan lumpur dan ancaman gelombang pasang, maka pelabuhan Barus sering berpindah tempat. Kota Barus yang menjadi bandar perdagangan sejak zaman kuno, mulai berkembang menjadi bandar yang ramai pada abad XVII. Pada abad ini, lokasi pelabuhan berada di daerah Lobutua, sekitar 4 - 5 km di sebelah utara pelabuhan Barus sekarang. Dari arah pantai, pelabuhan itu dapat dicapai dengan menyusuri Aek Maco (Aek Batanguar). Sesuai dengan letaknya, pada waktu itu pelabuhan Barus dikenal orang dengan nama Kuala Batanguar. Di kota pelabuhan ini terdapat pusat kegiatan perdagangan, terutama berupa kapur barus. Mungkin penamaan kota Barus berasal dari kapur barus yang dihasilkan daerah tersebut.

Diperkirakan pada abad XVIII,

Pelabuhan Batanguar di Lobutua tidak dapat dilayari lagi, karena adanya terjangan gelombang laut dan pengendapan lumpur di Aek Maco. Kapal dagang yang berada di perairan tersebut tidak dapat merapat di pelabuhan, sehingga tempat untuk menampung barang komoditi pun tidak memungkinkan di tempat itu. Hal ini menyebabkan lokasi pelabuhan dipindahkan ke pantai, sekitar 7 km di sebelah tenggara Lobutua, yaitu di pantai Desa Kedaigadang. Setelah dimanfaatkan selama beberapa dasawarsa timbul masalah lagi, karena lokasi ini pantainya curam dan terancam ombak besar. Abrasi pantai tidak dapat dihindari dan laut semakin dekat ke daratan. Apalagi pada musim angin tenggara sekitar bulan Mei-Juli, sering terjadi gelombang pasang yang dapat membuat kapal terbalik atau tenggelam diterjang badai. Untuk mengatasinya, Raja Barus terpaksa memindahkan lagi pusat perdagangannya di Muara Aek Batugerigis yang agak jauh dari pantai, yaitu sekitar 200 meter dari pantai yang sekarang. Tidak lebih dari setengah abad Pelabuhan Aek Batugerigis difungsikan, pelabuhan tersebut mengalami pengendapan lumpur, sehingga pendangkalan dan penyempitan sungai tidak dapat dihindarkan. Untuk menghadapi masalah alam tersebut, maka bandar dipindahkan lagi ke Bopet, yang sekarang menjadi ibukota Kecamatan Barus.

Bandar Bopet yang menjadi lokasi pelabuhan dagang yang baru, memiliki perairan yang cukup dalam dan luas. Hal ini menyebabkan para pedagangpun ikut pindah ke bandar tersebut. Lebih-lebih setelah Belanda ikut mengatur bandar itu, kota Barus menjadi tujuan pelayaran untuk mendapatkan kapur barus. Oleh Pemerintah Hindia Belanda,¹² Bandar Bopet dibangun fasilitas perdagangan secara permanen. Kepentingan Belanda membangun pelabuhan Bopet adalah untuk mendapatkan hasil daerah pedalaman yang laku di pasar Eropa.

⁹ MC. Surapti, dkk., *Studi Pertumbuhan dan Pemudaran Kota Pelabuhan : Kasus Barus dan Sibolga*. (Jakarta : Depdikbud, 1994/1995), hlm. 33.

¹⁰ Mhd. Nur, "Barus : Bandar Tua di Bagian Barat Nusantara", dalam Edi Sedyawati dan Susanto Zuhdi, *Arung Samudra, Persembahkan Memperingati Sewindu A.B. Lapien*, (Jakarta : Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, Lembaga Penelitian Universitas Indonesia, 2001), hlm. 157.

¹¹ C. Nooteboom, "Sumatra en de Zeevaart op de Indische Ocean", *Indonesie*, Tahun ke-4, 1950/1951, hlm. 127.

¹² Christine Dobbin, *Kebangkitan Islam Dalam Ekonomi Petani Yang Sedang Berubah, Sumatera Tengah Tahun 1784-1847*. (Jakarta : INIS, 1992), hlm.69-118.

Perdagangan dan Pelayaran

Kegiatan perdagangan dan pelayaran di Bandar Barus telah banyak memberikan andil bagi penduduk setempat untuk terlibat dalam bisnis ekspor-impor di daerah tersebut. Pedagang asing (Arab, India, Cina dan Belanda) yang datang membawa barang dagangan ke Barus, memanfaatkan penduduk pribumi sebagai perantara untuk memudahkan berkomunikasi. Tugas pedagang perantara membawa/menukar barang-barang seperti kain sutera, candu, garam dan keramik ke penduduk pedalaman. Sebaliknya, pedagang perantara ini bertugas mengumpulkan/membawa produk daerah belakang seperti kapur barus, lada, kemenyan dan hasil hutan lainnya ke kota Barus. Pedagang asing yang berdiam di kota pelabuhan ini bertindak sebagai penumpuk barang produksi daerah belakang dan mengangkutnya jika kapal-kapal dagang dari negaranya datang¹³.

Bandar Barus yang telah ada sejak awal abad pertama Masehi¹⁴, mencapai kejayaannya pada abad XVII dan XVIII. Pada zaman kolonial, orang Belanda memasukkan kawasan itu menjadi bagian dari wilayah *Sumatra's Westkust*, yang meliputi wilayah *Padang Bovenlanden* (Padang Darat), *Padang Benedenlanden* (Padang Pesisir) dan *Tapanoeli* (Tapanuli)¹⁵. Oleh Pemerintah Hindia Belanda, Barus dijadikan *afdeling* yang menjadi bagian dari Karesidenan Tapanuli, yaitu ketika Barus jatuh ke bawah pengawasan dan kekuasaan ekonomi serta politik administratif V.O.C. pada abad XVII¹⁶.

Mengingat Bandar Barus

menghasilkan barang-barang komoditi yang sangat laku di pasar internasional, maka tidak mengherankan jika bandar tersebut menjadi rebutan pengaruh dagang bagi orang-orang Eropa, seperti Inggris dan Belanda. Hal ini terbukti dengan adanya monopoli dagang antara Raja-Raja Barus dengan para pedagang asing. Pada awal abad XIX, Inggris mengikat kontrak dagang dengan Raja-Raja Tapani Nauli, yaitu dengan membuat perjanjian *Batigo Badunsanak* atau *Perjanjian Poncan*, yang ditandatangani oleh John Prince dan Raja-Raja Tapani Nauli pada tanggal 11 Maret 1815.

Dengan adanya Traktat London yang ditandatangani antara Inggris dan Belanda pada tahun 1824, maka kekuasaan Inggris atas Tapani Nauli berakhir. Sejak saat itu, Inggris menghormati kekuasaan Belanda atas seluruh bandar yang berada di pantai barat Pulau Sumatera. Sebagai imbalannya, Belanda menyerahkan Malaka, Tumasik (Singapura) dan Kalimantan Utara kepada Inggris.

Dengan kekuasaan yang penuh atas seluruh wilayah pantai barat Sumatera, Belanda pada tahun 1839 melakukan pengawasan perdagangan atas penduduk pribumi dan pedagang asing dan berhak meminta bea cukai terhadap ekspor kapur barus dan kemenyan di Bandar Barus¹⁷. Untuk mengawasi lalu lintas perdagangan antar bandar, pada tahun 1841 Belanda membangun kantor dagang di Barus¹⁸.

Pada waktu itu, kapur barus, kemenyan dan hasil hutan lainnya yang dibawa ke Bandar Barus harus diangkut dari daerah pedalaman melalui sungai. Untuk lebih

¹³ Budisantoso et. al., *op.cit.*, hlm. 38.

¹⁴ C. Nooteboom, *Sumatera dan Pelajaran di Samudra Hindia*, (Djakarta : Bhartara, 1972), hlm. 18.

¹⁵ Sartono Kartodirdjo, et. al., *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda Tahun 1839-1848*. Penerbitan Sumber-Sumber Sejarah No. 5. (Jakarta: ANRI, 1973), hlm. 84.

¹⁶ V.O.C. pertama kali mendapat izin secara resmi di Pantai Barat Sumatera pada tahun 1663 dengan ditandatanganinya *Perjanjian Painan*. M.D. Mansoer, dkk., *Sejarah Minangkabau*, (Jakarta : 1970), hlm.91.

¹⁷ Departement van Binnenlands Bestuur. "Algemeen Verslag Tapanoeli Over 1917-23 Maart 1918", *Koloniaal Verslag van 1918*. Hoofdtuuk C., hlm. 2.

¹⁸ Di samping membangun kantor dagang, Belanda juga membangun pelabuhan dan beberapa fasilitasnya di Bopet, wilayah Desa Aek Batugerigis berupa bangunan dermaga dan tanggul dari batu karang sebagai penahan gelombang di sepanjang perairan. Untuk lebih jelasnya, lihat *Sejarah Sumatera Utara*, (Jakarta : Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), hlm.34.

memperlancar angkutan barang, Belanda kemudian membangun jalan tanah yang dipadatkan dari Barus ke Sibolga sepanjang 67 km. Barang-barang komoditi yang diangkut ke Barus, kemudian ditumpuk di gudang dan baru dibongkar setelah ada kapal dagang yang akan mengangkutnya datang. Sebelum dibeli, barang-barang di gudang tersebut diawasi oleh Raja Barus yang bermarkas di Barus Hilir

Kegiatan perdagangan di Bandar Barus memberi peluang kerja, baik untuk penduduk setempat maupun penduduk luar daerah, terutama sebagai buruh angkut dari lapangan penumpukan ke perahu tongkang, kemudian dari perahu tongkang ke kapal, dan sebaliknya. Kapal besar tidak dapat merapat ke pantai. Selain itu kegiatan angkut barang ikut melibatkan para pemilik tongkang, dan petugas penarik bea cukai.

Berbagai jenis barang kebutuhan untuk kepentingan masa itu tersedia di Bandar Barus. Barang-barang yang berasal dari Teluk Tapanuli, termasuk barang-barang dari bandar di sepanjang pantai barat yang menjadi daerah belakang (*hinterland*) juga dikumpulkan ke Bandar Barus untuk kemudian diekspor ke negara lain, seperti ke Arab, Eropa, Gujarat, dan India¹⁹.

Bandar Barus juga merupakan pintu gerbang tempat masuknya orang asing ke Tapanuli, baik sebagai pedagang, misi agama maupun politik. Setelah Belanda melakukan monopoli perdagangan, barang-barang komoditi yang dihasilkan daerah pedalaman Tapanuli dibeli oleh Pemerintah dari pedagang lokal dengan harga yang telah ditetapkan melalui penguasa negeri.

Barang yang dibawa ke Bandar Barus dikapalkan ke kapal lain. Adapun barang yang dijual belikan di Bandar Barus dan di *Onan* (pasar tradisional yang tersebar di pelosok kota) di antaranya yaitu tembikar, candu, buku, alat musik, hiasan, wangi-wangian,

gelas, kristal, emas, perak, pakaian, rami, kain wool, kain lenan, kain katun, makanan, alat keperluan kapal, baja, anggur, minuman keras, sutra, nipah, garam, obat, cerutu, payung kopi, gula, lada, beras, kemenyan, tembakau, makau, gambir, kayu, kulit, gading, kapas, kapur barus, merica, rotan, lilin, buah-buahan, kuda, cempedak, bingai, dan sebagainya.²⁰

Lalu lintas perdagangan dan pelayaran serta keluar masuknya barang komoditi membentuk Barus menjadi bandar dengan tipe *entrepot* dan *feeder point*, yakni bandar yang letaknya strategis pada jaringan perdagangan untuk melayani pengumpulan barang dari berbagai negeri, dan berhubungan langsung dengan daerah penghasil barang komoditi. Fungsi Barus sebagai bandar *entrepot* dan bandar dagang lebih menonjol dari pada pusat administratif Residensi Pemerintah Hindia Belanda, sebab perdagangan merupakan faktor utama bagi tumbuhnya bandar itu akibat dari berkumpulnya kapal dagang²¹.

Pada akhir abad XVIII Bandar Barus masih terkenal sebagai pusat pelayaran dan perdagangan di pantai barat Sumatera. Bandar itu menjadi pintu gerbang dari daerah pedalaman dan tempat pengumpulan berbagai jenis barang komoditi yang sangat laku di pasaran internasional.²² Daerah pedalaman menghasilkan kapur barus, kemenyan, gambir, kopi karet, pinang, kapas, padi dan sebagainya. Sedangkan daerah pantai menghasilkan ikan laut, kelapa dan barang

²⁰ Rapp, G.Ch., *Aansluitend op Memorie Gobeë 1914 en Memorie Monteiro 1916 over de Onderafdeeling Baroes, Bataklanden, Tapanoeli*, 23 October 1926, hlm. 17.

²¹ Leong Sau Heng, *Collecting Centres, Feeder Points and Entrepots in the Malay Peninsula, 1000 B.C.-A.D. 1400*", dalam Kathirithamby-Wells & John Villers, ed. *The Southeast Asian Port and Polity Rise and Demise*. (National University of Singapore : Singapore University Press, 1990), hlm. 17.

²² *Verslag van het Beheer en den Staat der Nederlandsch Bezittingen en Kolonien in Oost en West Indie en ter Kust van Guinea over 1853, Ingediend doorden Minister van Kolonien*. Utrecht : Kemink en Zoon, 1858, hlm. 176-177.

¹⁹ J.C. van Leur, *Indonesian Trade and Society, Essays in Asian Social and Economic History*. (Dordrecht-Netherlands : Foris Publications, 1983), hlm. 17. Lihat juga N.J. Krom, *Hindoe Javansche Geschiedenis (Hindu-Javanese History)*. (The Hague : Second Edition, 1931), hlm. 39, 45.

komoditi lainnya yang dibawa oleh para pedagang pantai ke bandar lain dan berbagai negeri. Barang itulah yang menyebabkan Barus tumbuh menjadi sebuah kota dagang yang cukup lama²³. Sebagai pusat perdagangan, Barus mendatangkan kemakmuran pada penduduknya, khususnya dalam bidang perekonomian. Hal ini dimungkinkan karena barang yang dibawa oleh pedagang asing dijual kepada konsumen melalui penduduk yang bermukim di pelabuhan Barus tersebut.

Berkumpulnya berbagai etnis di Bandar Barus, melahirkan kelompok masyarakat pesisir yang berorientasi laut. Para pedagang dari berbagai daerah tersebut, kemudian membentuk koloni sesuai dengan asal daerah masing-masing. Mengingat di Lobutua merupakan pusat perdagangan, maka tidak mengherankan jika di kampung tersebut menjadi pusat pemukiman para pedagang dari berbagai daerah dan berbagai etnis.

Sebelum Belanda menguasai Barus, ada kecenderungan perdagangan antar bandar di sepanjang pantai barat Sumatera. Raja-Raja negeri, pemilik kapal, nakhoda dan penduduk bandar terlibat dalam perdagangan. Di antara penduduk setempat banyak yang menjadi pedagang perantara bagi pedagang asing dan pedalaman. Sebagai pedagang perantara, mereka memberi kemudahan antara pedagang asing dan pedalaman.

Tampaknya, para pedagang pantai dapat lebih terbuka dan berani dari pada penduduk pedalaman untuk menghadapi tantangan dan juga lebih berani dalam menghadapi resiko kerugian. Mereka juga lebih berani dalam mengarungi samudra yang penuh bahaya, dibandingkan dengan pedagang yang berasal dari pedalaman. Maka tidak mengherankan, jika orang-orang yang berjiwa *entrepreneur* inilah yang berhasil menjadi pengusaha yang sukses dan menjadi *pionir* dalam perdagangan. Mereka merupakan

inovator yang berani menanggung risiko, memiliki visi ke depan dan memiliki ciri keunggulan dalam berusaha²⁴. Jiwa inilah yang dimiliki para pedagang pantai.

Sistem perdagangan melalui para pedagang pantai kadang-kadang menimbulkan keuntungan yang tidak seimbang antara pedagang di pedalaman dengan pedagang di bandar. Keuntungan terbesar tetap berada di tangan pedagang pantai, karena pedagang pantai lebih menguasai pasar dari pada pedagang pedalaman. Dalam waktu yang relatif singkat, banyak pedagang pantai yang menjadi kaya raya dengan memiliki beberapa kapal dagang²⁵.

Peran pedagang pantai tidak hanya sebagai pedagang keliling, tetapi juga *pionir* yang telah memungkinkan pertukaran barang dagangan antar bandar satu dengan bandar lainnya, sehingga menyebabkan hubungan antara pantai dan pedalaman terjalin erat.

Bandar Barus memberikan fasilitas tertentu kepada daerah pedalaman, seperti perlindungan keamanan, sebagai pusat pemasaran daerah belakang, pusat pemerintahan dan sebagainya. Barang impor yang ditangani penduduk pantai dapat dinikmati oleh penduduk pedalaman²⁶.

Kendatipun, Bandar Barus merupakan bandar yang sangat ramai, tetapi ada semacam mata rantai pelayaran antar bandar sehingga

²⁴ Justus M. van der Kroef "Entrepreneur and Middle Class in Indonesia", *Economic Development and Cultural Change*. 2 Januari 1954, hlm. 315.

²⁵ Kapal dagang yang dimiliki para pedagang pantai pada umumnya berbentuk kapal tradisional yang bernama "Pincalang". Kapal-kapal Pincalang inilah yang banyak mondar-mandir di Pelabuhan Barus. Sedangkan kapal kapal uap, kapal motor, kapal mesin, kapal layar besar dan kapal modern lainnya kebanyakan berasal dari negara lain. Adapun kapal Belanda yang sering singgah di Pelabuhan Barus adalah Kapal *Koninlijke Pakketvaart Maatschappij* (KPM, Perusahaan kapal milik Belanda). Kapal Belanda ini melalui rute dari Aceh, Barus, Padang terus ke Jawa melalui Selat Sunda. Untuk lebih jelasnya lihat Budhi Santoso, et. al., *op.cit.*, hlm. 50.

²⁶ Jane Drakard, *A Malay Frontier Unity and Duality in a Sumatran Kingdom*, Studies on Southeast Asia Program (SEAP) 120 Uris Hall, Ithaca (New York : Cornell University, 1990), hlm. 45.

²³ Willian Marsden, *op.cit.*, hlm. 220. Lihat juga Muhammad Saleh Datuk Orang Kaya Besar, *Riwayat Hidup dan Perasaan Saya*, (Bogor : S.M. Latif, 1975). Mhd. Nur, *op.cit.*, hlm. 162.

menjadi suatu pelayaran estafet. Dengan demikian, di setiap bandar sudah ada kapal besar yang telah menunggu untuk memuat barang-barang komoditi yang datang, dan diteruskan ke bandar berikutnya. Adapun bandar yang berfungsi sebagai tempat persinggahan adalah Susoh (Kuala Batu), Labuhan Haji, Meuke, Singkil, Barus, Sorkam, Sibolga, Batumundam, Tabuyung, Kukun, Natal, Batahan, Airbangis, Sasak, Tiku, Pariaman, Padang, Painan, Air Haji, Pasir Ganting (Indrapura) dan Bandar Sepuluh²⁷. Dengan adanya mata rantai perdagangan antar bandar, dapat dinyatakan bahwa Barus dapat berfungsi sebagai pelabuhan transito.

Di samping sebagai pusat perdagangan, Bandar Barus juga dikenal sebagai pusat masuknya agama Islam di Sumatera Utara. Pendapat ini dapat dibuktikan dengan adanya batu nisan makam Syekh Rukumuddin di Barus²⁸. Pendapat ini dikuatkan oleh Dada Meuraxa dalam Seminar Sejarah Masuknya Islam ke Nusantara di Medan tanggal 17-20 Maret 1963. Dalam seminar tersebut dirumuskan bahwa pada abad pertama Hijrah, agama Islam telah masuk di pantai barat Sumatera, namun tidak disebutkan nama bandarnya. Dengan adanya kebutuhan kapur barus dan kemenyan di Timur Tengah sejak zaman Raja Fir'aun, besar kemungkinan pedagang Arab telah masuk ke Barus untuk mencari barang-barang tersebut sambil menyiarkan agama yang dianutnya.

Surutnya Bandar Barus

Menjelang tri dasa warsa pertama abad XIX, Bandar Barus secara berangsur-angsur mulai surut. Ada dua faktor utama yang menyebabkan turunnya peran bandar tersebut

sebagai pusat perdagangan di wilayah pantai Barat Sumatera, yaitu faktor eksternal dan internal.

Faktor eksternal yang menyebabkan Bandar Barus mulai mundur dipengaruhi oleh munculnya Bandar Sibolga sebagai pusat Karesidenan Tapanuli. Mengingat perairan Sibolga terlindung oleh pulau-pulau Tapan Nauli, maka suasananya lebih tenang dan terhindar dari gelombang pasang, menyebabkan banyak pedagang yang beralih ke Bandar Sibolga.

Lebih-lebih setelah Bandar Sibolga dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda dengan fasilitas lengkap pada tahun 1842, menyebabkan perubahan pusat pelayaran dan perdagangan dari Barus ke Sibolga. Apalagi setelah Pemerintah Belanda membuka perkebunan kelapa sawit, karet, tembakau dan kopi, menyebabkan peran Sibolga sebagai pelabuhan ekspor kian penting. Selain itu, munculnya pelabuhan Belawan di Pantai Timur Sumatera Utara dan Teluk Bayur di Sumatera Barat, yang dengan cepat berkembang menjadi bandar yang ramai, ikut mempercepat pudarnya Bandar Barus²⁹.

Adapun faktor internal yang mempercepat tenggelamnya Bandar Barus, karena adanya pertikaian yang berlarut-larut antara Raja Barus Hilir dengan Raja Barus Mudik. Sebab lain karena jaringan ke pedalaman mulai sepi sebagai akibat munculnya jaringan baru ke Sibolga. Konflik internal di antara raja-raja Barus menyebabkan banyak kapal dagang yang berpindah ke bandar lain yang lebih menguntungkan.

Sepinya Bandar Barus sebagai akibat dari berfungsinya Bandar Sibolga menjadi persoalan tersendiri bagi penduduk setempat. Lebih tragis lagi setelah Belanda membangun Bandar Padang pada tahun 1892 dan Bandar Belawan pada tahun 1922. Ketiga pelabuhan yang difungsikan oleh Belanda tersebut cepat berkembang menjadi pelabuhan ekspor

²⁷ Muhammad Saleh Datuk Orang Kaya Besar, *loc.cit.* Lihat juga Tsuyoshi Kato, "Rantau Pariaman : The World of Minangkabau Coastal Merchant in the Nineteenth Century", *Journal of Asian Studies*, Vol. XXXIX, No. 4, Agustus 1980, hlm. 729-752.

²⁸ Zuardi Simanulang, "Menguak Tabir Bandar Tua di Dunia", dalam *Pesisir Nauli* No. 24/II/Juni 1996, hlm. 29-30.

²⁹ Freek Colombijn, "Patches of Padang, The History of an Indonesian Town in the Twentieth Century and the Use of Urban Space", *Thesis Ph.D.*(Leiden : CNWS Leiden University, 1994), hlm. 46-47.

komoditi perkebunan yang mulai dibuka sejak awal abad XIX³⁰.

Penutup

Barus yang terkenal sebagai bandar tua di wilayah pantai barat Sumatera Utara, pernah mengalami masa keemasannya pada awal abad XVII hingga Akhir abad XVIII. Barang-barang komoditi yang dihasilkan di antaranya kapur barus, kulit, damar, kemenyan dan rotan. Barang-barang tersebut menjadi komoditi ekspor dan perdagangan antar pulau yang penting pada masa itu.

Bersamaan dengan pertumbuhan Barus sebagai bandar yang ramai, juga terjadi interaksi antar suku bangsa sehingga membentuk sebuah kolonisasi yang kompleks. Di Barus muncul permukiman pedagang yang berasal dari berbagai etnis dari berbagai daerah dan negeri. Percampuran antar etnis, melahirkan kelompok masyarakat yang menamakan dirinya sebagai *orang pesisir*. Mereka memiliki adat-istiadat yang telah dipengaruhi oleh Islam dengan bahasa yang berbeda dengan mereka yang tinggal di pedalaman.

Masa kejayaan barus akhirnya pudar, seiring dengan munculnya Bandar Sibolga, Teluk Bayur dan Belawan pada pertengahan abad XIX. Dengan dibangunnya berbagai fasilitas di kota Sibolga oleh Pemerintah Belanda, maka Sibolga tumbuh menjadi kota

bandar yang sangat ramai. Hal ini menyebabkan perwakilan dagang yang semula berada di Barus beralih ke Sibolga.

Sebagai akibatnya, kegiatan perdagangan dan pelayaran tidak lagi menjadi kegiatan pokok penduduk Barus. Kegiatan para pedagang perantara, buruh bongkar muat di kapal dan kegiatan jasa lainnya sudah tidak nampak lagi di Barus. Sebagian dari mereka mengalihkan pekerjaannya menjadi nelayan dan petani. Hanya sedikit yang tetap melakukan perdagangan dan pelayaran. Dampak kemunduran Barus juga terasa pada hilangnya kesempatan bekerja dan berusaha, sehingga menimbulkan pengangguran dan kemiskinan yang semakin dirasakan penduduk Barus. Hal ini menimbulkan keresahan yang sering kali menjadi pertengkaran dan perkelahian, sehingga Barus menjadi daerah yang miskin dan tertinggal dibandingkan dari daerah lain.

Dihadapkan pada situasi sulit, banyak penduduk Barus yang kemudian merantau ke daerah lain untuk mengadu nasib. Daerah yang mereka datangi kebanyakan kota-kota besar, seperti Medan, Padang, Natal, Sibulga, Bandar Aceh Darussalam dan Batavia (sekarang Jakarta). Ada juga yang hijrah ke daerah Singkil, Kluet, Aceh Selatan, Aceh Barat dan Simeulue. Hal ini menyebabkan kota tersebut menjadi semakin mundur. Ketertinggalan Barus menjadi berlarut-larut hingga sekarang kota tersebut hanya menjadi kota kecil yang tak banyak perannya di bidang perdagangan dan pelayaran.

³⁰ Rusli Amran, *Padang Riwayatmu Dulu*. (Jakarta : Yasaguna, 1988), hlm. 12.

Drs. Seno adalah Asisten Peneliti Madya pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh.

Keberadaan Bahasa Jawi di Aceh (Tinjauan Historis)

Oleh Titit Lestari

Pendahuluan

Kemampuan akan menulis dan membaca pada salah satu suku bangsa merupakan salah satu wujud kebudayaan. Pengetahuan akan membaca dan menulis pada masyarakat Aceh banyak dipengaruhi oleh Islam, bahkan dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat Aceh dipengaruhi dan bercermin pada ajaran Islam. Meskipun sebelum Islam masuk ada kebudayaan Hindu yang telah masuk lebih dahulu ke Aceh, tetapi kebudayaan Islam-lah yang lebih berurat akar dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Kebudayaan Islam telah lama ada yaitu sejak berdirinya kerajaan Islam Peurelak pada tahun 840 M (225 H) yang merupakan kerajaan Islam pertama di nusantara ini.¹ Berdasarkan hasil Seminar yang diselenggarakan oleh MUI Prop. Aceh tahun 1978 menyimpulkan bahwa hal-hal yang bertalian dengan perkembangan Islam yang terpenting adalah :

- a. Sebelum Islam masuk, sudah ada kerajaan-kerajaan di Aceh diantaranya Lamuri dan kerajaan-kerajaan lain yang tersebut dalam sumber Asing
- b. Pada abad ke 1 Hijriah, Islam sudah masuk ke Aceh, dan
- c. Kerajaan Islam yang pertama adalah Peureula', Lamuri dan Pasai.

Hasil karya masyarakat Aceh tidak terlepas dari pengaruh agama Islam. Hampir

semua kebudayaan Aceh, mulai pada bidang ekonomi, sosial, seni budaya selalu mencerminkan nilai-nilai Islami. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai warisan kebudayaan masyarakat Aceh yang sangat dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Penggunaan tulisan *Jawi* dan bahasa *Jawi* merupakan salah satu wujud kebudayaan Islam yang ada dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Masuknya Islam ke Aceh

Sepanjang perjalanan sejarah, kepulauan nusantara merupakan wilayah-wilayah yang sangat strategis. Wilayah ini merupakan penghubungkan negeri-negeri di sebelah timur seperti Cina dan Jepang dengan negeri-negeri disebelah barat seperti Parsi, Gujarat, dan negara-negara Arab, Afrika serta benua Eropa. Keberadaan pedagang ini sangat besar artinya bagi kebudayaan masyarakat setempat yang mereka singgahi.

Ramainya jalur lalu lintas perdagangan antar negara ini menyebabkan munculnya pelabuhan-pelabuhan transit di selat Malaka yang merupakan tempat bertemunya para pedagang dari segenap penjuru dunia. Pelabuhan-pelabuhan yang terbentuk adalah Pasai (abad ke-14), Melaka (abad ke-15), Aceh (abad ke-16). Para pedagang muslim yang datang ke bandar Pasai (pada masa Kerajaan Islam Pasai) disamping berdagang juga membawa serta agama Islam dan bersama-sama dengan ustadz, yang didalamnya termasuk para penganut paham kesufian, menyebarkan agama Islam di kerajaan ini yang selanjutnya menjadikan kerajaan ini sebagai pusat perkembangan dan penyebaran agama Islam di Asia Tenggara.

¹ Engku Ibrahim Ismail, "Pengaruh Syi'ah Parsi dalam Sastra Melayu Islam di Nusantara", *Sinar Darussalam No. 172/173 Tahun 1989*, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 1989), hlm. 63.

Kemasyuran kerajaan Islam Pasai hingga saat ini masih dapat ditelusuri. Dan kerajaan ini banyak menarik perhatian pada peneliti karena pada masa ini banyak muncul kitab-kitab dan hikayat yang merupakan salah satu jendela sejarah untuk melihat kejayaan masa lampau.

Sejak adanya kerajaan Islam Peureulak, pendidikan Islam mendapat perhatian yang cukup banyak dalam pembangunan, dilanjutkan pada saat kerajaan Islam Pasai hingga pada masa Kerajaan Islam Aceh Darussalam (1511-1650), agama Islam telah sangat berkembang pesat. Sehingga pada masa itu semua rakyat Aceh telah dapat membaca Al-Qur'an serta kitab-kitab dan hikayat yang ditulis dalam bahasa Melayu, bahasa Aceh, dan bahasa Arab.

Tulisan *Jawi* yang banyak digunakan dalam naskah-naskah kuno jaman kerajaan-kerajaan di Aceh adalah tulisan Arab yang dalam penggunaannya digunakan untuk menulis bahasa melayu. Penggunaan bahasa melayu sudah cukup lama digunakan. Penggunaan Tulisan *Jawi* dalam berbagai macam peninggalan sastra di aceh mulai di gunakan setelah kebudayaan Islam masuk ke wilayah ini. Masyarakat Aceh mengenal tulisan *Jawi* adalah setelah mereka mengenal Al-Quran dan bisa membaca Al-Quran.

Pada beberapa peninggalan kesusastraan di Aceh hampir semuanya ditulis dengan menggunakan tulisan *Jawi*. Pada beberapa peninggalan kesusastraan di Aceh hampir semuanya ditulis dengan menggunakan tulisan *Jawi* dengan bahasanya yang dikenal dengan bahasa *Jawi*. Bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang merupakan turunan dari bahasa Melayu yang tidak diturunkan dari bahasa Kawi atau Jawa Kuno ataupun Sanssekerta walaupun di dalam terdapat jejak-jejaknya, sehingga dewasa ini ada sementara orang yang beranggapan bahwa perubahan bahasa melayu 'kurang sempurna' sehingga perlu diperkaya dengan bahasa-bahasa daerah (dalam hal ini terutama : Jawa Kuno)²

²R. Roolvink, Bahasa *Jawi* atau Bahasa Sumatera. Banda Aceh : PDIA, 1985). hlm. 1.

Keberadaan Bahasa Jawi

Bahasa *Jawi* dapat juga disebut sebagai bahasa Melayu berkembang dengan pesat terutama setelah penduduk sekitar Selat Malaka memeluk agama Islam. Perkembangan penggunaan bahasa *Jawi* pada masa ini didukung dengan adanya para penyebar agama Islam yang menggunakan bahasa *Jawi* atau bahasa Sumatera (dalam hal ini bahasa Melayu) dalam menyebarkan agama Islam. Menurut Roolvink (1975) bahasa Melayu dianggap masih 'perawan' dan oleh Islam dijadikan *lingua franca* karena tidak dikhawatirkan akan disusupi bahaya dalam menginterpretasikan pengertian-pengertian baru yang dibawa atau akan digerogoti makna hakikinya oleh pengertian dan anggapan Hindu-Buddha yang telah.³

Dominasi kekuasaan Sriwijaya di selat Malaka mengalami keruntuhan pada akhir abad ke-13. Kondisi ini memberikan peluang bagi Kerajaan Islam Pasai untuk mengembangkannya diri. Mengenai awal keberadaan Islam di Kerajaan Islam Pasai⁴ belum dapat dipastikan secara jelas. Akan tetapi jika kita mendasarkan pada terbentuknya sistem politik yang berupa lembaga kerajaan yang bercorak Islam dapat dikatakan bahwa kerajaan Islam Pasai terbentuk pada abad ke 13.⁵

Berdasarkan peninggalan arkeologis menunjukkan bahwa raja pertama yang disebut dalam Hikayat Raja-Raja Pasai bernama Meurah Silu.⁶ Setelah memeluk agama Islam Merah Silu memilih nama baru

³ *Ibid*, hal. 27.

⁴Kerajaan Pasai ini selanjutnya disebut Samudera Pasai

⁵ M. Gade Ismail, *Pasai dalam Perjalanan Sejarah : Abad ke-13 sampai Awal Abad ke-16*. (Jakarta : Depdikbud, 1997), hlm. 25.

⁶ Dalam kamus Djayadiningrat (Atjehsche-Ned, Woordenboek) disebutkan bahwa *Meurah* adalah gelar untuk seorang raja sebelum ada Sultan di Aceh. Sedangkan menurut Mohammad Said (dalam Aceh Sepanjang Abad I hal 82) *Meurah* searti dengan gelar *Marah* di Minangkabau, juga dimaksudkan untuk orang yang ditinggalkan, *Silo* menurut ejaan Aceh berarti *Silau*.

yaitu Sultan Malik al-Salih (Malikussalih). Beliau wafat pada tahun 696 H atau tahun 1297 M. Dengan demikian beliau disebut sebagai raja yang beragama Islam pertama di Pasai.

Jika kita mengkaji keberadaan tulisan *Jawi* maka akan muncul pertanyaan tulisan apa yang digunakan sebelum penggunaan tulisan *Jawi*? Untuk menjawab pertanyaan ini kita akan melihat sejarah keberadaan masyarakat di Aceh. Menurut Engku Ibrahim Ismail (1989),

“Orang-orang India yang tiba ke Nusantara adalah dipercaya dari Corromandel, kemudian dari Bengal dan Magatha, dan akhirnya sekali lagi pengaruh India dari bahagian selatan telah memperkenalkan banyak perkataan-perkataan Sanskrit dalam bentuk tulisan Tamil dan selepas itu perkataan-perkataan Parsi dan Arab yang dengannya terbentuklah bahasa Melayu yang dikenali hari ini Dari beberapa inskripsi yang ditemui di Sumatera yang bertarikh sejak abad ke-7 hingga abad ke-XIV tidaklah terdapat tulisan melayu selain dari tulisan-tulisan Parsi-Arab sahaja”.⁷

Berdasarkan sumber di atas maka tulisan Melayu asli tidak ditemukan. Akan tetapi dalam hasil karya sastra Melayu banyak digunakan tulisan Parsi-Arab dengan bahasa Melayu. Hal ini juga terjadi di daerah Aceh yang merupakan rumpun Melayu. Kerajaan Islam Pasai yang banyak meninggalkan karya sastra yang berupa hikayat maupun kitab ditulis dalam tulisan Parsi-Arab dengan bahasa Melayu yang disebut juga sebagai bahasa *Jawi*.

Meskipun sebelum masuknya pengaruh Arab (Islam), masyarakat telah mengenal budaya Hindu, tetapi budaya Hindi ini hampir tidak meninggalkan bekas. Hampir

dalam semua segi kehidupan masyarakat pada jaman itu berpedoman pada Islam. Hal ini diakibatkan karena penggunaan kasta-kasta dalam budaya Hindu yang mengelompokkan manusia di dasarkan pada derajatnya sedangkan pada Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang mempunyai kedudukan sama di mata Allah swt.

Hikayat Raja-raja Pasai merupakan salah satu peninggalan karya sastra yang banyak menceritakan tentang keberadaan Kerajaan Islam Pasai. Dalam hikayat ini juga dikisahkan mengenai bagaimana proses Meurah Silu memeluk agama Islam dan juga mengenai periode awal kerajaan Pasai. Naskah ini ditulis dalam tulisan *Jawi*. Naskah Hikayat Raja-Raja Pasai yang tersimpan di Royal Asiatic Society, London, dalam koleksi Raffles MS No. 67. merupakan naskah yang di salin di Demak pada Januari 1814, dibawa Raffles ke Inggris pada tahun 1816 dan setelah ia meninggal diserahkan oleh Lady Raffles kepada Royal Asiatic Society pada tanggal 16 Januari 1830. Pada tahun 1849 teks ini diterbitkan dalam tulisan *Jawi* di Paris oleh Edouard Dulaurier dalam *La Chronique du Royau de Pasey, Collections des Principales Chroniques Malayes*, Jilid I. Kemudian Aristide Marre menerjemahkannya ke dalam bahasa Perancis dan diterbitkan di Paris pada tahun 1874 dengan judul *L'Historie des Rois de Pasey*. Pada tahun 1914 teks ini disalin dalam tulisan Latin oleh P.J. Mead termuat dalam *JSBRAS* 66 dan pada tahun 1960 oleh A.H. Hill dalam *JMBRAS* 33,2, 1960.⁸

Sufi terkenal dari Aceh, Hamzah Fansuri banyak menghasilkan karya tulis yang sebagian besar dibakar oleh Sultan Iskandar Thani (memerintah 1636-1641) atas anjuran Mufti Kerajaan Aceh Darussalam Nuruddin ar-Raniri, karena dianggap bersalahan dengan ajaran agama yang berlaku waktu itu. Dalam mukaddimah karangannya yang berjudul *Syarab al-'Asyiqin* di tulis dalam bahasa *Jawi*.⁹

⁷ Engku Ibrahim Ismail, Pengaruh Syi'ah Parsi dalam Sastra Melayu Islam di Nusantara, *Sinar Darussalam No. 172/173 Tahun 1989*, (Banda Aceh : IAIN Ar-Raniry). hlm. 72.

⁸ T. Ibrahim Alfian, Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah. (Banda Aceh : PDIA, 1999). hlm. 51.

⁹ *Ibid*, hal 54.

Syaikh Syamsuddin ibn Abdullah as-Sumatrani yang merupakan murid Hamzah Fansuri banyak menghasilkan karya dalam bahasa Arab dan Melayu. Salah satu kutipan dalam kitabnya *Mir'at al-Mu'min* yang dikarang pada tahun 1601 dikemukakan alasan beliau menggunakan bahasa *Jawi* yang beliau sebut sebagai bahasa Pasai. Kutipan tersebut :

“.....terbanyak daripada orang yang mulia daripada saudaraku yang salih Karena tiada mereka itu tahu akan bahasa Arab dan Parsi, tetapi tiada diketahui mereka itu melainkan bahasa Pasai jua”¹⁰

Dari kutipan di atas terlihat bahwa bahasa *Jawi* (bahasa Pasai) lebih banyak dikuasai oleh penduduk setempat dari pada bahasa Arab dan Parsi.

Bahasa *Jawi* digunakan juga untuk menerjemahkan kitab suci Al-Quran agar lebih mudah dipelajari dan dimengerti oleh penduduk. Terjemahan Al-Quran dalam Bahasa *Jawi* pertama kali ditulis oleh Syaikh Abdurrauf dan tafsir Al-Quran juga diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa *Jawi*. Tafsir Al-Quran pertama yang ditulis dalam bahasa *Jawi* ini diberi nama *Tarjuman al-Mustafid*.

Penutup

Setelah Kerajaan Pasai ditaklukan oleh kerajaan Aceh Darussalam, kebudayaan Melayu Pasai berpindah ke Bandar Aceh Darussalam. Keadaan ini semakin memperkuat kedudukan bahasa *Jawi* dalam kerajaan. Hal ini dibuktikan dengan semakin berkembangnya karya sastra pada masa Kerajaan Aceh Darussalam.

Setelah membaca uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa *Jawi* (bahasa Melayu) telah diproses oleh agama Islam dan

diangkat menjadi bahasa ilmu pengetahuan dalam bidang agama, filsafat, dan sastra sehingga berkembang menjadi bahasa kebudayaan. Islam telah masuk dalam segala sendi kehidupan masyarakat Aceh dengan melalui penggunaan tulisan Arab-Parsi yang digunakan untuk menulis bahasa *Jawi*. Perkembangan bahasa *Jawi* berkembang pesat seiring dengan perkembangan agama Islam di kawasan ini. Bahkan hingga sekarang pengaruh tersebut masih ada dengan diberlakukannya peraturan pemerintah daerah yang mengharuskan seluruh papan nama instansi dan usaha lain dengan menggunakan tulisan Arab-Parsi.

Bahasa melayu memang berkembang pesat dan telah ada sejak berabad-abad lalu hanya saja tidak ditemukan tulisan asli melayu. Bahasa *Jawi* (bahasa melayu) ditulis dalam tulisan Arab-Parsi, hal ini disebabkan karena pengaruh Islam yang masuk dan memperkenalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenal Al-Quran kenudian dibaca dan sanggup menulis maka tulisan yang mereka kenal selanjutnya adalah tulisan dari huruf Arab-Parsi saja. Penggunaan tulisan Arab-Parsi ini menunjukkan bahwa terdapat keterikatan yang erat antara Arab (sebagai pusat agama Islam) dengan masyarakat Aceh. Disebutkan bahwa pada masa Kerajaan Peureulak hingga kerajaan Aceh Darussalam, Islam dan rakyat Aceh telah menjadi satu sehingga hasil karya masyarakat Aceh yang berupa kesusasteraan (berupa kitab dan hikayat) berarti juga kesusasteraan Islam, atau sekurang-kurangnya kesusasteraan Aceh adalah kesusasteraan yang berjiwa dan bernaftaskan Islam.

Di pesantren-pesantren di wilayah ini masih menggunakan tulisan Arab-Parsi untuk menulis bahasa Indonesia. Bahasa *Jawi* telah mengalami berbagai macam penyempurnaan untuk selanjutnya berkembang menjadi bahasa Indonesia yang hingga saat ini masih dipakai di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam.

¹⁰ *Ibid*, hal. 54.

Sukuten Nangke Beobak

Cerita ini berasal dari daerah Alas, yang menceritakan tentang seorang anak yang bernama Nangke Beobak. Nangke Beobak adalah seorang anak yang cerdas dan pantang menyerah pada keadaan. Kecerdikan dan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya berhasil membawanya mendapatkan kebahagiaan yang diidam-idamkan. Makna yang terkandung dalam cerita ini adalah kekayaan rohani lebih tinggi nilainya daripada kekayaan jasmani atau harta benda. Selain itu, kecerdikan akan mampu mengalahkan sifat keserakahan orang.

Lotme cerite sebuah jaman dahulu megelah Nangke Beobak gelarne, ie ende bebere raje ni alasme bekasne, uan ne mame lot nange. Sedangken raje ende mame ne ende bayak kaliken. Ie ende merempus, ngakaplense begeni kutekenne be amene nine,"Made tedi ame kite ende pedue due kambin sungkun kadume anak mame ken pemaindu, ame."Uwe " kate amene. Tenimu te, tapi made de lot dapet edi nine. Kane neleme kite kalak mesekin, karene edi dapeme pot anak raje agakmu biarpe turangu empung anak madenge potne karene ie kalak mckerajae, ie bayak sedangken kite kalak mclarat kate amene.

Te ndie ame made tentue, bagas made tentu edi anak mame edi pitu tak apaken pot sungkun kaudume lebe sentue. Lanjar sungkun amene sendere, buetne belo buetne kade-kade, merangkatune amene mungkem senduene, sohnue iepe, "Gat roh kedah kau kake," kate turangne. "Uwe" nine, njadi bagas edi langkah kende ndae bamu, mungkun babereku ken pemain ku ukurku sentue nende, nine. Gat kade turungne de begedi mesungkun kamin bebero meno apaken ndie nine.

Ranjar gat babaineme beberene sentue berambih, gat suruhne ngidahken kutune. Seran ongidahken kutu gat sungkemne beberene sentue ende. "Nateku akunde roh ndae nungkun kau, kerane kau ende ken pemainku"nine"ah, made kusikel bibi,"nine gat cidurine takal bibine ndae. Kerane maingin beberene ie pe gat mebalik. Katekenne beturangne, gat turangnepe

nungkun ie," Te kune nge kate beberemu ndae kake?" "Yeh, malot inginne gat nicedurine hamin bakalku." "Endeme si made kucocoke da," kate raje. De made ingin mekateken maingin mekateken masah pendapatku bebi mate kalak nine, mebalik keseme ame Nangke Beobak gat nialo alone amene gat sungkunne," Kune nge katekane ndae ame nine? Nine. "Yeh, gat cidurine hamin takalku pemedene inginne nine." "De gat cidurenge hamin takal ndu made-made nine mesungken kande hamin sisentengahne nine. Laus tule amene mungkun seutengah edipe begedi kami. Nisungkun tule begedi kane kerine sohme sikeeuemne, macamme rasau amene, tepe suruhme kane mungkun anak amamene sesampunne. Karene mege desaken amakne amenepa made kejelaken, lanjar gat merangkat tule bekute. Gat nisungkut beberene si sampunne ndae. Njadi jawab sesampun, "De tedinge nidu bibi kaiken salahne aku made memiliki isepe bibi de gat bayak nge kate Tuhan kenepe gat bayak ngedi,"nine ngateken bibine, tedeme kate sesampunne. Lanjar gat sanahine turangne. "Te kune kate beberemu nine," "yeh, pat iye nine, de latnge petemun kaiken salahne nine. De gat bayaknge kate Tuhan abang Nangke Beobak edi kunepe gat bayak nge nine. Petemunge batang setuhune kate bebereku nine, mebalik keseme amene berumah, gat nisungkun tule. "Kaenge kate puteri ndae ken ame nine?" "De, iye kae salahne nine kade amane malot halangen nine. Kerane ie made udaranni kalak bayak nine. "Edi kandu idah edi nggow pot iye edi

Cerita Rakyat

ame nine. De nggou pot iye kae nae ame, pagi laut tor kandu, gat bahan janji rut mame, nine.

Terang kese wari gat nibuet belo buet pinang, daram kacu secukupne, buet sayuren gat babe ameneme berine terus iye penter berumah mamene, mbaline kane gundurne sebuah babe jambi, mbah cimun gat laus bekate.

Tekederken Tuhan soh keseme bekute gat niserahkenme bebaune ndae, lanjar gat buetken baban ndae gat babe be dapur, lanjar gat nikubale, nibekeme lanjar kepene isine bagas kerine senuanne ndae emas. Gat nikusikkenme beduan rajepo begedi, tekane kate kake-kake si uncu patut pot kau ken anak bibi edi nine, tedi kepene isi empus nangke Baobak edi, terus kepene matemu nine kate kake kakene ngateken iye. Debegegi kate raje segereme perintah be Nangke Baobak bekutende kanc segere iye nibere hukum kate raje. Detedi kae nenge megat teberasme kete kate raje. Gat bahanneme janji, bagas sejumat nde rohme meraleng, mbahme Nangke Baobak bende kane nipekawinme nele iye rut si uncu kate tuan raje. Bagas edi rohme nele kalak meraleng, gat lanjarme ninikahken. Nggou keseme sewari sidue wari iye selamat, merangkat menele iye natene be empus nda nikekande nine ngateken wan sentucne.

Nteremme kalah rut ndahi kekadene, mamelot kekadene lam salam isi ni mpusne, niangkatme bekute. Setengah buah gundur, cunun serte jambi ndae merisi emasme. Nggou kese pulung barang ndae kerine bekute iyepo mekateme nele be mamene. "Kalak ramine ni kuale menage, aku udepo menageme nateku nine." "De menage natemu kae kaline, kaeken natemu ken menagemu nine?" "Page menateken ken menageku mame nine ngateken mamene." De page nimu page, aku ngumpulkan ce kate mamene. Gat pulungken mamene page sebuah bungki mbelin, gat ni babeneme bekkepat lauten. Soh keseme, iepo menageme nele, kalakpe rohme nungkun. "Kae kin kandu babe tuan saudagar?" "Iye si kubabe ende page!" "Te

kunekin regene?" Regene made lot mahal, kedepne hamin mebalik bangku edi hamin regene berasne benin kedepne bangku nine, mege begedi gat melale kalak nambari pagene ndae rut kedep. Gat ni tutu kalak, kadepne nireken kalak kerine baue. Kedepne nipulungken kerine bebungki. Enggou keseme dom kerine iyepo gat mebalik. Bagas mebalik, ngidah iye nggou soh, mekateme kalak." Enou nggou roh Nangke Beobak kate kalak nitapim. Soh keseme gat nicapakken kedep ndae be laweken nakan ikan gat kerine, iyepo gat ndarat berumah, apenge untungmu Nangke Beobak kate mamene?" Edi melabe pudi mame nine malot seudah untungme mame melamken pudi nine. "Te nimu Nangke Baobak tedi iyepo sip," Tandak Nangke Beobak pe tule nirambih, puke-puke iye tule. Nggore kese begedi nipidone tule menage bekuale be mamene, kae nge ken pokok nine made kurang pokok kate mamene. Kae ken natemu ken menagemu nine. Yeh, meniwer pelin mame nine. Pulungken niwer sebuah kapal, nggou kese deru iyepo merangkatne tule bekasne munge ndube. Ngidah iye nggou soh, roh kalepe tule bane, kae kandu babo kate kalak, niwer nine. Kunc regeue kate kalak? Yeh, ende made merege, kulingne, sudunc rut separate pelen kemin balikken bangku nine. Kerine niwerne ndae babe kalak gat perebut kalak kae dermade nukar. Kulangne, sudunc rut separate nibere ken kalak berine bane mebalik. Nggou kese nibalikken kalak bane separa sudu, sabut nadae doru nue kapal tule lanjar mebalikme nele iyere. Seran balik nimbang tengah lauten, nicapak kenne me nele kerine barangne nadae ke laut, nicapaki urang neme niperintahme, nggoume besur ikan nilautpe manganise lepe mebalik menele berumah, tandak tule nirambih, pepelin mpuhe.

Kae kin nele sikau jenengi kahe mamene, menage ukur hu tule mame. Kae kin ken menagemu kate mame, nateken de lot kin kandu simpan mas, edimu nateku ken menageku be kuale. Kane nisiapken mameneme. Kerine kae siniparlukan ne.

Tukang mas lanjar nidadeng kane mas endi nipilpili gau nipepulungme batu bulet, penat, mesugipe nemu kauc. Kane nisalutme kerine balunde kue mas ndage, tedi perintah si Nangke Baobak.

Nggou kescme kapal pe dom rut mas saluten udagi, iycpe melayarme tule be kuale, soh kesemc nikuale, langganenne ndube scgere roh njumpai ie, kae ken kande bube saudagar kate kalak.

Ende mas bulet simanenge bentuk, mas batang. Lot ken mas ndin si nggou bentuk babe bende sambari rut mas batang ndc nine. Gat nterem mekalak simesikel, gat kerime masnc ndae mesambar, iepe mebalik rule benegeri alas.

Soh keseme ni alas gat nitaruhme mas ndae be rumah, lanjar gat mbueme masne rut wan senduene rajc ndae. Nggou kesc begedi, iyepe bayakme nele. Lanjar senipe niame petcrepc mekate be si uncu. "Ndak tedi uncu kami ndc ken pengkurung manukmu lahpe nine, nidapc mparas kake nine ngatken kakene keru kerinepc."

Mbalik cerite tebe negeri Kuale Si nitadingken Nangke Beobak, kerane senisambari ndage nibabe meradu be pande mas, tapi kerine isine batu, tuhu mas luar nagri tapi salutne ha, biu. Tapi rugipe kune ndape nituntut, karene ndube waktu iye menage pagi berasne bekalak kedepne nibalikken bane, menage niwerpe sabuetne, sudune, rut separne bane santan rut minyakne tading bekalak berane iye melabe pudu bagas menage, tukanne iye melabe pudu.

Nggou keseme begedi Nangke Beobak pe makan rumah ne ngen nisalueneme kerene sinemu nisalut, rekane pekakas dapur serta kerine metatahken intan belian emas pirak iyeme kerine simbuene. Senangme ate rajepc, walanpe kake-kakene merasa nesal kae kane made pot ne ndube be Nangke Beobak. Mebahageeme iyepe rut si dcberu serte amene kerime nele kesahuc. (Disadur dari *Cerita Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Mite dan Legende)* oleh Zaini Ali, dkk, Depdikbud Proyek IDKD 1980/1981. Ditulis kembali oleh Elita Batara Munti, S.Sos.)



TERBITAN

1

Dari
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN
NILAI TRADISIONAL BANDA ACEH

Jurnal SUWA 4/2002

Kebudayaan suku bangsa memiliki ciri yang bersifat fisik dan non fisik. Berkaitan dengan ciri tersebut, maka sebuah kebudayaan ada yang dapat dilihat maupun tidak dilihat. Hal yang dapat dilihat salah satunya adalah tingkah laku atau perilaku manusia, baik dalam kehidupan sehari-harinya maupun cara berhubungan dengan orang lain yang menimbulkan interaksi. Sementara yang tidak terlihat adalah pola dari interaksi tersebut yang memang dibuat untuk mengatur dan menjaga agar interaksi diantara anggota masyarakat berjalan dengan baik. Pola interaksi inilah yang nantinya dalam tiga penelitian dirangkum dalam jurnal Suwa keempat ini disebut dengan **tata krama**.

Tata Krama yang terdapat di Indonesia beraneka ragam. Demikian pula halnya dengan tata krama suku bangsa yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Ada hal-hal tertentu yang pada satu suku bangsa dianggap suatu aturan yang merupakan suatu hal yang sopan, sedangkan pada suku bangsa lain hal tersebut dianggap tidak sopan, sehingga bila seseorang tidak mengetahui dan tidak mengerti akan dapat menimbulkan kesalahpahaman yang bahkan dapat menjurus ke arah konflik. Oleh karena itu, sebelum kita memasuki suatu daerah yang belum dikenal sebaiknya mengetahui terlebih dahulu bagaimana adat istiadat terutama yang berkaitan dengan tata krama yang berkembang dalam masyarakatnya.

Dalam konteks inilah Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh meluncurkan kembali tiga hasil penelitian tentang tata krama dari tim peneliti Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh yang terangkum dalam Jurnal Suwa keempat, sehingga diharapkan dari peluncuran jurnal Suwa ini dapat memberikan pemahaman yang dalam terhadap pembaca tentang adat-istiadat yang berkembang di Nanggroe Aceh Darussalam. Adapun tata krama yang menjadi bahasan di dalam Jurnal SUWA keempat ini adalah tata krama pada suku bangsa Alas, Aneuk Jamee, dan Tamiang. Bagi pembaca yang berminat dapat menghubungi perpustakaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh. (Abw)

BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA
BANDA ACEH

KARTU BUKU

NO. INV. :
NO. BUKU : 05
PENGARANG :
JUDUL :
Banda Aceh
No. 25

TGL. KJ

17 OCT

30 J

KEMBALIKAN BUKU INI SEBELUM ATAU
PADA TANGGAL YANG TERTERA DI BAWAH INI
17 OCT 2016
30 JAN 2017
10 DEC 2018

Pi

Bala

Dengar
RI

Diharapl
yang adil